

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, UPAH
MINIMUM REGIONAL, TINGKAT
PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN INVESTASI
TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2013-2024**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

WINDA AULIA SHAFARA HARYANTO

NIM. 12020118120041

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Winda Aulia Shafara Haryanto
Nomor Induk Mahasiswa : 12020118120041
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Ilmu Ekonomi
Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PENGARUH JUMLAH PENDUDUK,
UPAH MINIMUM REGIONAL,
TINGKAT PERTUMBUHAN
EKONOMI, DAN INVESTASI
TERHADAP TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2013-2024**
Dosen Pembimbing : Dr.agr. Deden Dinar Iskandar, S.E., M.A.

Semarang, 18 Juni 2025

Dosen Pembimbing,



Dr.agr. Deden Dinar Iskandar, S.E., M.A.

NIP 197804082006041016

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Winda Aulia Shafara Haryanto
Nomor Induk Mahasiswa : 12020118120041
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Ekonomi
Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PENGARUH JUMLAH
PENDUDUK, UPAH MINIMUM
REGIONAL, TINGKAT
PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN
INVESTASI TERHADAP
TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA DI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2013-2024**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 20 Juni 2025

Tim Penguji

1. Dr.agr. Deden Dinar Iskandar, S.E., M.A.

(.....)

2. Dr. Jaka Aminata, S.E., M.A.

(.....)

3. Arif Pujiyono, S.E., M.Si.

(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Winda Aulia Shafara Haryanto, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Regional, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2024** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah olah tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 10 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Winda Aulia Shafara Haryanto

NIM 12020118120041

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari (kejahatan) yang diperbuatnya
(QS. Al-Baqarah: 286)

Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan
(QS. Al-Baqarah: 5-6)

Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu.

-Ika DF

Segala sesuatu yang berawal dari niat baik, kerja keras, dan doa yang tak pernah putus akan menemukan jalannya. Skripsi ini sebagai bukti kecil perjuangan yang tidak pernah sendiri dalam setiap langkahnya, terdapat do'a dari orang tua, dukungan dari keluarga, para sahabat, dan pertolongan Allah SWT yang tak pernah henti. Hidup mungkin penuh tantangan, tetapi keluarga merupakan bentuk alasan untuk tetep bertahan dan terus berjuang. Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan pencapaian ini sebagai bukti apabila setiap tantangan merupakan proses dari bentuk pendewasaan, bukanlah pengahalang, melainkan jembatan menuju mimpi dan harapan yang lebih besar.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of population size, regional minimum wage, economic growth rate, and investment on the open unemployment rate in Central Java Province during the period of 2013–2024. The open unemployment rate is a critical indicator in assessing the success of regional economic development as it reflects the extent to which the working-age population is absorbed into productive activities. This research employs a quantitative approach using panel data regression analysis. Secondary data were obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and processed using the EViews 13 software.

The Chow and Hausman tests indicate that the most appropriate estimation model is the Fixed Effect Model (FEM). The regression results reveal that population size has a positive and significant effect on the open unemployment rate, while regional minimum wage and economic growth rate have negative and significant effects. Conversely, the investment variable does not have a significant effect on the open unemployment rate. Simultaneously, the four independent variables significantly influence the open unemployment rate in Central Java. The adjusted R^2 value of 0.5609 indicates that the model explains approximately 56.09% of the variation in the open unemployment rate.

These findings imply that policies to reduce unemployment in Central Java must be comprehensive—not only through job creation but also by controlling population growth, adjusting fair minimum wages, promoting inclusive economic growth, and enhancing the quality of labor-oriented investments. This research is expected to provide valuable input for local governments in formulating effective and sustainable employment development policies.

Keywords: Open Unemployment, Population Size, Regional Minimum Wage, Economic Growth, Investment, Panel Data Regression

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, upah minimum regional, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan investasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2013–2024. Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah karena mencerminkan sejauh mana penduduk usia kerja dapat terserap dalam aktivitas produktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah menggunakan perangkat lunak *EViews 13*.

Hasil uji Chow dan Hausman menunjukkan bahwa model estimasi yang paling tepat adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, sedangkan upah minimum regional dan tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan. Sebaliknya, variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Secara simultan, keempat variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. Nilai adjusted R^2 sebesar 0,5609 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 56,09% variasi yang terjadi dalam tingkat pengangguran terbuka.

Temuan ini memberikan implikasi bahwa kebijakan pengendalian pengangguran di Jawa Tengah harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui penciptaan lapangan kerja baru, tetapi juga melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk, penyesuaian upah minimum yang adil, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, serta meningkatkan kualitas investasi yang berorientasi pada penciptaan tenaga kerja. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan yang efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk, Upah Minimum Regional, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Regresi Data Panel.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Regional, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2024.” Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kendala dan hambatan, namun semua dapat teratasi berkat doa, bantuan, bimbingan, dorongan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Faisal, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dr.Agr. Deden Dinar Iskandar, S.E., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang membimbing dengan penuh kesabaran serta mendukung seluruh kelancaran dalam pembuatan skripsi sehingga skripsi dapat terselesaikan.
3. Ibu Maal Naylah, S.E., M.Si. selaku Dosen Wali selama menimba ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Bapak Dr. Jaka Aminata, S.E., M.A. selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Seluruh Dosen dan staff Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan pengetahuan selama masa studi.
6. Sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada Orang Tua tercinta Bapak Suharyanto dan Ibu Nugraheni yang selalu menjadi penyemangat, selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih

sayang yang tulus, motivasi, serta dukungan dan mendoakan penulis dalam hal apapun, sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

7. Keluarga penulis Linda, Resa, Khumaira, Khalisa yang selalu memberikan dukungan semangat, motivasi, serta doa yang tidak hentinya diberikan kepada penulis selama pembuatan Tugas Akhir ini.
8. Hilda, Dhea, Rosalia, Nabila, Afta sebagai sahabat yang selalu memberikan support kepada penulis, terimakasih sudah menjadi pendengar untuk keluh kesah penulis.
9. Terimakasih Cendy, Ayuk, Tania sudah bersedia menjadi teman penulis selama kuliah hingga saat ini yang sudah memberikan dukungan.
10. Pihak-pihak yang mendoakan, menyemangati, dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak bisa disebutkan, penulis mengucapkan terimakasih.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak sempurna serta memiliki banyak kekurangan karena pada dasarnya tidak ada ciptaan manusia yang sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan agar skripsi ini dapat menjadi karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkannya. Penulis mengucapkan terimakasih bagi pihak-pihak tersebut atas kritik, saran, masukan dan respon terhadap skripsi ini dan penulis sendiri.

Semarang, 19 Juni 2025

Penulis,



Winda Aulia Shafara Haryanto

NIM. 12020118120041

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	14
2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	14
2.1.1. Tingkat Pengangguran Terbuka	14
2.1.2. Jumlah Penduduk	23
2.1.3. Upah Minimum Regional.....	27
2.1.4. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	32
2.1.5. Investasi.....	38
2.1.6. Penelitian Terdahulu	41
2.2. Kerangka Pemikiran.....	49
2.3. Hipotesis.....	50

BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1 Jenis Penelitian.....	55
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	55
3.2.1 Variabel Dependen.....	55
3.2.2 Variabel Independen	56
3.3 Populasi dan Sampel	57
3.4 Jenis dan Sumber Data	58
3.5 Metode Pengumpulan Data	59
3.6 Metode Analisis	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	72
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	74
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	74
4.2.2 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel.....	76
4.2.3 Uji Asumsi Klasik	79
4.2.4 Uji Signifikansi t (Uji t)	83
4.2.5 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	86
4.2.6 Koefisien Determinasi (R^2)	88
4.3 Pembahasan.....	89
BAB V PENUTUP	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2024	3
Tabel 2.1 Upah Minimum Regional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2024	31
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	41
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	74
Tabel 4.2 Hasil Uji Cow	76
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman	77
Tabel 4.4 Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)	78
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	81
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	82
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	82
Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikansi t (Uji t)	84
Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	87
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	49
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	80



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Tabulasi Data Penelitian.....	103
Lampiran 2. Output <i>Eviews</i>	114



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah strategis di Pulau Jawa dengan potensi ekonomi yang sangat beragam. Keberagaman sektor ekonomi, mulai dari pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hingga pariwisata menjadikan Jawa Tengah sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, letaknya yang strategis di tengah Pulau Jawa membuatnya menjadi jalur penghubung logistik utama antara wilayah barat dan timur Indonesia. Ketersediaan tenaga kerja yang melimpah sebagai dampak dari jumlah penduduk yang tinggi menjadi salah satu keunggulan komparatif dalam pengembangan industri padat karya. Di sisi lain, dukungan infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan jaringan jalan yang memadai turut memperkuat daya tarik investasi baik domestik maupun asing (Hendaryanto, 2018).

Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan keunggulan lokasinya yang strategis di tengah Pulau Jawa, provinsi ini memiliki potensi untuk memaksimalkan konektivitas antarwilayah, mendukung arus barang dan jasa, serta memperkuat basis produksi nasional. Keberagaman sektor ekonomi seperti pertanian, industri manufaktur, perdagangan, dan pariwisata semestinya menjadi pilar utama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kasanah dkk., 2018).

Jumlah penduduk yang besar dan ketersediaan tenaga kerja yang melimpah seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal. Pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menciptakan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga memastikan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan kesempatan yang sama bagi semua orang. Ini berarti pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Dengan dukungan infrastruktur yang terus berkembang serta tren investasi yang meningkat, Jawa Tengah secara ideal memiliki semua elemen pendukung untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka secara berkelanjutan (Diyanti, 2022).

Realitas yang terjadi tidak sepenuhnya mencerminkan harapan tersebut. Meskipun Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan menunjukkan peningkatan dalam jumlah investasi, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi ini masih tetap tinggi dalam beberapa periode. Data menunjukkan bahwa tidak semua pertumbuhan dan investasi berhasil terserap dalam bentuk penciptaan lapangan kerja baru yang memadai. Bahkan, di beberapa sektor justru terjadi peningkatan penggunaan teknologi dan efisiensi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja (Mohini, 2022). Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan

kemampuan sektor-sektor ekonomi untuk menciptakan pekerjaan yang cukup bagi angkatan kerja yang terus bertambah.

Permasalahan tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Tengah menjadi paradoks mengingat besarnya potensi ekonomi dan daya dukung wilayah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap variabel-variabel ekonomi makro yang memengaruhi TPT, seperti jumlah penduduk, upah minimum regional (UMR), tingkat pertumbuhan ekonomi, dan investasi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris terhadap kondisi struktural pengangguran yang terjadi di Jawa Tengah selama tahun 2013 - 2024.

Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2024 sebagaimana nampak pada tabel 1.1. di bawah ini:

Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2024

No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (%)	Keterangan
1	2013	5,61	-
2	2014	6,21	Naik
3	2015	7,07	Naik
4	2016	5,61	Turun
5	2017	4,57	Turun
6	2018	4,47	Turun
7	2019	4,44	Turun
8	2020	6,48	Naik
9	2021	5,95	Turun
10	2022	5,57	Turun
11	2023	5,13	Turun
12	2024	4,78	Turun

Sumber: (<https://Jateng.Bps.Go.Id>, n.d.)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, tercatat dari tahun 2013 - 2024 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan. Tentunya jumlah pengangguran yang ada sangat sulit untuk ditiadakan, karena setiap tahun akan terdapat penambahan jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja, kelulusan sekolah menengah maupun kelulusan mahasiswa perguruan tinggi yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, namun setidaknya tetap harus ada upaya untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada.

Kesenjangan antara potensi ideal dan realitas empiris menjadi permasalahan utama yang patut dikaji secara mendalam. Potensi ekonomi dan sumber daya yang besar tidak serta-merta menjamin rendahnya angka pengangguran. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan struktural dalam sistem ekonomi regional Jawa Tengah, khususnya terkait dengan efektivitas investasi, distribusi pertumbuhan sektor ekonomi, serta keterkaitan antara kebijakan upah dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian empiris terhadap berbagai variabel ekonomi makro seperti jumlah penduduk, upah minimum regional, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan investasi yang diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian sebelumnya masih terjadi *research gap* yang menunjukkan adanya keanekaragaman faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Penelitian ini bermaksud untuk meneliti lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka

tersebut. Melalui identifikasi dan pemahaman terhadap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah tersebut, diharapkan para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dapat merancang strategi yang tepat untuk mengatasi masalah yang terjadi. Dengan demikian, potensi ekonomi dan sosial dapat dimaksimalkan, serta kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara merata.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan pendekatan dan objek yang beragam. Hasil-hasil dari penelitian terdahulu ini menjadi referensi dalam menyusun penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2019) meneliti pengaruh upah minimum regional dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh selama periode 1984–2018. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa upah minimum regional berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, sementara laju pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Namun, secara simultan, kedua variabel tersebut bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengupahan memiliki peran penting dalam mengendalikan pengangguran, meskipun pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menurunkan angka pengangguran apabila tidak inklusif.

Tumilaar dkk. (2022) mengkaji pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota

di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menemukan bahwa seluruh variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka. Secara spesifik, jumlah penduduk dan upah minimum berpengaruh negatif signifikan, sedangkan pendidikan justru menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap pengangguran. Temuan ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara variabel pendidikan dan pengangguran, yang bisa jadi disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Helvira dan Rizki (2020) di Provinsi Kalimantan Barat dengan mengkaji pengaruh investasi, upah minimum, dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat pengangguran terbuka. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Namun, secara parsial, investasi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan upah minimum berpengaruh positif signifikan, dan IPM berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun variabel-variabel tersebut secara kolektif penting, tidak semuanya memberikan pengaruh langsung yang kuat secara individu.

Suhadi dan Setyowati (2022) meneliti pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum, dan PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, upah minimum berpengaruh positif terhadap pengangguran, sementara PDRB berpengaruh negatif. Variabel jumlah penduduk dan pendidikan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Namun demikian,

keempat variabel tersebut secara simultan terbukti memengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Temuan ini memperlihatkan bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi lebih efektif dalam mengurangi pengangguran dibandingkan variabel lainnya, setidaknya dalam konteks Jawa Barat.

Penelitian oleh Mustaqilla (2023) menganalisis pengaruh upah minimum provinsi, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan angka melek huruf terhadap tingkat pengangguran terbuka di sepuluh provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah minimum dan angka melek huruf tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dan investasi justru memiliki pengaruh positif dan signifikan. Temuan ini agak berbeda dengan asumsi umum, karena menunjukkan bahwa peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta menurunkan pengangguran, tetapi justru dapat meningkatkannya apabila tidak bersifat inklusif atau tidak padat karya.

Secara keseluruhan, hasil dari berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel ekonomi terhadap pengangguran sangat bergantung pada konteks wilayah, struktur ekonomi daerah, dan kondisi tenaga kerja setempat. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang penting untuk dijawab dalam penelitian ini, khususnya terkait bagaimana keempat variabel utama jumlah penduduk, upah minimum regional, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan investasi

mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu 2013–2024.

Pemilihan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada relevansi teoritis dan signifikansi empiris terhadap permasalahan pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. Variabel-variabel tersebut yaitu jumlah penduduk, upah minimum regional (UMR), tingkat pertumbuhan ekonomi, dan investasi, merupakan komponen utama dalam dinamika pembangunan ekonomi daerah yang berpotensi memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja. Jumlah penduduk yang tinggi pada dasarnya dapat menjadi modal pembangunan melalui penyediaan tenaga kerja yang melimpah. Namun, apabila tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja yang memadai, hal ini justru akan memicu peningkatan angka pengangguran. Oleh karena itu, variabel ini penting untuk dianalisis guna mengetahui sejauh mana tekanan demografis berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah.

Upah Minimum Regional (UMR) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan pekerja (Mohini, 2022). Namun, kebijakan ini juga memiliki implikasi terhadap pasar tenaga kerja. Kenaikan UMR dapat menambah beban biaya produksi, khususnya bagi sektor padat karya, yang pada gilirannya dapat menurunkan permintaan tenaga kerja. Variabel ini dipilih untuk melihat apakah terdapat hubungan negatif atau positif antara penetapan UMR dan tingkat pengangguran di wilayah yang bersangkutan.

Pertumbuhan ekonomi secara umum diasumsikan mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi yang pada gilirannya diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja (Ardian dkk., 2022). Namun, dalam beberapa kasus, pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat inklusif dan tidak serta-merta menurunkan pengangguran jika tidak didukung oleh struktur ekonomi yang padat karya. Oleh sebab itu, penting untuk menelaah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap TPT secara empiris dalam konteks Jawa Tengah.

Investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, berperan sebagai penggerak utama dalam penciptaan lapangan kerja melalui pembukaan usaha dan peningkatan kapasitas produksi (Sabihi dkk., 2021). Namun demikian, tingkat efisiensi dan sektor tujuan investasi akan menentukan sejauh mana investasi tersebut mampu menurunkan pengangguran. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2013 - 2024. Kombinasi variabel ini juga diharapkan mampu menjawab kesenjangan empiris dalam penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat parsial.

Penelitian ini difokuskan pada pengangguran terbuka dengan menggunakan data sekunder yang tersedia di Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (<https://jateng.bps.go.id>, n.d.). Dengan mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingkat pengangguran terbuka, diharapkan para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dapat

merancang strategi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Regional, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2024” menjadi relevan dan penting untuk dilakukan guna memberikan kontribusi dalam penanganan permasalahan pengangguran terbuka di wilayah tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah Tahun 2013 - 2024?
2. Bagaimanakah pengaruh upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah Tahun 2013 - 2024?
3. Bagaimanakah pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah Tahun 2013 - 2024?
4. Bagaimanakah pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah Tahun 2010 – 2015?
5. Bagaimanakah pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Regional, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah Tahun 2013 - 2024?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah Tahun 2013 - 2024.
2. Menganalisis pengaruh upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah Tahun 2013 - 2024.
3. Menganalisis pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah Tahun 2013 - 2024.
4. Menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah Tahun 2013 - 2024.
5. Menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Regional, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah Tahun 2013 - 2024.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian secara teoretis dan memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dapat merancang strategi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dalam merancang strategi yang tepat serta mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi selanjutnya yang ingin melakukan pengembangan penelitian di bidang yang sama.

1.4. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Telaah Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Analisis, dan Bab V Penutup. Setiap bab dalam penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan bab-bab lainnya. Sistematika ini digunakan untuk memudahkan dalam menyusun skripsi, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang ide yang mendasari dilakukannya penelitian dan berisi latar belakang yang secara garis besar memuat hal-hal yang mengantarkan pada pokok permasalahan, rumusan masalah yang dijadikan sebagai dasar dilakukannya penelitian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, dan manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi telaah pustaka. Bab ini terdiri dari landasan teori yang akan dibahas, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

Bab III berisi tentang metode penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai jenis variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV berisi tentang hasil dan analisis data penelitian. Pada bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data serta interpretasi hasil penelitian.

Bab V berisi penutup, yang menjelaskan simpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu pada bab ini juga berisi tentang keterbatasan penelitian serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

2.1.1.1. Pengertian Pengangguran

Masalah makro ekonomi yang memiliki pengaruh langsung dan merupakan yang paling berat bagi manusia ialah pengangguran. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Maka sudah tidak mengejutkan lagi jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Greogry, 2006).

Menurut Muslim (2014), pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Pengangguran (*Unemployment*) merupakan masalah yang hampir selalu ada dalam setiap perekonomian, terutama di Negara berkembang seperti Indonesia. Secara umum pengangguran didefinisikan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang mereka butuhkan dan mereka inginkan.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengangguran merujuk pada situasi dimana seseorang harus dihadapkan dengan keadaan ketiadaan kesempatan kerja. Meningkatnya pengangguran

di suatu daerah dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka ketika penduduk yang banyak tanpa ada penyediaan lapangan pekerjaan yang banyak pula akan mengakibatkan pengangguran semakin banyak.

2.1.1.2. Jenis-Jenis Pengangguran

Pengangguran tidak selalu identik dengan orang yang tidak memiliki pekerjaan. Orang yang sudah memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan dan menjalankan pekerjaannya juga dapat digolongkan sebagai pengangguran karena konsep pengangguran dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu: waktu, identitas pekerjaan, dan produktifitas. Berikut ini beberapa jenis pengangguran menurut Muslim (2014), yaitu:

a. Pengangguran normal atau friksional

Jika dalam suatu perekonomian terdapat pengangguran dua hingga empat persen dari jumlah angkatan kerja, maka perekonomian berada dalam kesempatan kerja penuh (*full employment*). Pengangguran sebesar dua hingga empat persen tersebut dipandang sebagai pengangguran normal atau friksional.

b. Pengangguran struktural

Pengangguran ini disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Tidak semua industri dan perusahaan dalam suatu Negara akan terus berkembang maju, sebagian dari perusahaan dan industri akan mengalami kemerosotan yang mengakibatkan penurunan produksi

sehingga sebagian pekerja terpaksa harus diputuskan hubungan kerjanya dan menjadi penganggur.

c. Pengangguran siklikal

Pengangguran ini disebabkan karena harga komoditas primer sebagai bahan baku industri turun, dan ini mengakibatkan produksi komoditas ikut menurun. Turunnya harga ini terkait dengan permintaan luar negeri yang turun, sehingga output perusahaan turun yang berarti perusahaan harus mengurangi pekerja sehingga menjadikan pengangguran (Rahardja, 2006).

d. Pengangguran musiman

Pengangguran ini berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sector pertanian. Misalnya, di luar musim tanam dan panen petani umumnya menganggur sampai menunggu musim tanam dan panen berikutnya.

e. Pengangguran teknologi

Pengangguran ini disebabkan karena perubahan teknologi, dari yang sederhana menjadi modern. Tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin sehingga membuat tenaga kerja diputuskan hubungan kerjanya dengan perusahaan.

f. Pengangguran politik

Pengangguran ini disebabkan karena adanya peraturan-peraturan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan pengangguran.

g. Setengah penganggur

Tenaga kerja yang termasuk setengah penganggur adalah kelompok tenaga kerja yang lamanya bekerja (dalam satuan hari, jam, ataupun minggu) kurang dari yang seharusnya mereka bisa kerjakan.

- h. Pengangguran terbuka Pengangguran terbuka dapat dibagi menjadi dua yaitu: - Pengangguran sukarela, merupakan kelompok angkatan kerja yang memilih tidak bekerja karena tidak bersedia digaji pada jumlah tertentu maupun mengharapkan pekerjaan yang lebih baik. Pengangguran terpaksa, merupakan kelompok angkatan kerja yang merupakan kelompok angkatan kerja yang bersedia bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan (Muana, 2001).

Setiap negara selalu berusaha agar tingkat kemakmuran masyarakatnya dimaksimumkan dan perekonomian selalu mencapai pertumbuhan yang mantap dan berkelanjutan. Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai tingkat pengguna tenaga kerja penuh, hal ini dapat dilihat dengan jelas dari berbagai akibat buruk sifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran.

2.1.1.3. Pengertian Pengangguran Terbuka

Secara definisi menurut Dewi (2017), pengangguran terbuka adalah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada. Tingginya pengangguran terbuka

mengindikasikan jika penduduk yang telah memasuki usia kerja namun belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran kerja diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja yang ada.

Menurut Gani (2022), pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dilihat dari angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja.

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang sedang bekerja sebelumnya. Sedangkan pekerja yang digolongkan setengah pengangguran (*underemployment*) adalah pekerja yang masih mencari pekerjaan penuh atau sambilan dan mereka yang bekerja dengan jam kerja rendah (di bawah sepertiga jam kerja normal, atau berarti bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu), namun masih mau menerima pekerjaan, serta mereka yang tidak mencari pekerjaan namun mau menerima pekerjaan itu. Pekerja digolongkan setengah pengangguran parah (*severely underemployment*) bila ia termasuk setengah menganggur dengan jam kerja kurang dari 14 jam seminggu (Putera, 2024).

Pembahasan mengenai pengangguran yang selalu diperhatikan bukanlah mengenai jumlah pengangguran, tetapi mengenai tingkat pengangguran yang dinyatakan sebagai persentasi dari angkatan kerja (Todaro dan Smith, 2006). Untuk melihat keterjangkauan pekerja (kesempatan bekerja), maka digunakan rumus tingkat pengangguran terbuka. Adapun rumus yang digunakan menghitung tingkat pengangguran terbuka rumus sebagai berikut:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$$

Definisi dari tingkat pengangguran terbuka ialah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada. Tingkat pengangguran terbuka memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok penganggur. Tingkat pengangguran kerja diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk mengukur tingkat pengangguran terbuka pada suatu wilayah bisa didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen (Aprilya dan Juliprijanto, 2022).

Menurut Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id/>, n.d.), menyebutkan bahwa pengangguran terbuka terdiri atas:

- a. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan
- b. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha

- c. Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
- d. Penduduk yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja.

Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Terdapat kecenderungan pada mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari kerja sesuai dengan keinginan mereka. Generasi muda pada umumnya menginginkan pekerjaan di sektor modern atau di kantor. Ironisnya, untuk mendapatkan pekerjaan itu mereka bersedia menunggu untuk beberapa lama (Saputri, 2019).

Tidak tertutup kemungkinan, banyak generasi muda yang berusaha mencari pekerjaan di kota atau di provinsi atau daerah yang kegiatan industrinya telah berkembang. Hal ini yang menyebabkan angka pengangguran terbuka cenderung tinggi di kota atau daerah yang kegiatan industri atau sektor modern telah berkembang. Sebaliknya angka pengangguran terbuka rendah di daerah atau provinsi yang kegiatan ekonomi masih bertumpu pada sektor pertanian (Rahmawati dkk., 2022).

Pengangguran terbuka berkaitan dengan tingkat pendidikan di daerah yang rendah. Pada umumnya, mereka yang berpendidikan rendah bersedia bekerja apa saja untuk menopang kehidupan. Bila sektor pertanian kurang dapat menjamin kelangsungan hidup, mereka bersedia berusaha di kantor informal. Mereka tidak memperdulikan apakah jam kerja panjang atau penghasilan rendah. Bagi mereka yang penting dapat bertahan hidup (Aswanto, 2021).

2.1.1.4.Dampak Pengangguran Terbuka

Menurut Muslim (2014), beberapa akibat buruk dari pengangguran dibedakan menjadi dua aspek sebagai berikut:

a. Akibat buruk ke atas kegiatan perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari memperlihatkan berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran.

Akibat-akibat buruk tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
- 2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit. Jika penerimaan pajak rendah, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.

3) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin- mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan keuntungan kelesuan berkurang. Kegiatan Keuntungan perusahaan yang rendah menyebabkan mengurangi keinginan untuk melakukan investasi.

b. Akibat buruk ke atas individu dan masyarakat Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah:

1) Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencarian dan pendapatan.

2) Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek.

3) Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.

Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangguran membawa akibat buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan. Pengangguran tidak mampu untuk menggalakkan

pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka waktu pendek. Selain itu, pengangguran yang terjadi juga akan membawa beberapa akibat buruk terhadap individu dan masyarakat. Dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat dapat meningkatkan kriminalitas serta kurangnya keamanan.

2.1.2. Jumlah Penduduk

2.1.2.3. Pengertian Jumlah Penduduk

Badan Pusat Statistik Indonesia (<https://www.bps.go.id/>, n.d.), menjabarkan “Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap”. Sedangkan menurut Todaro dan Smith (2006), yang dimaksud dengan penduduk adalah “jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi”.

Malthus dalam Diyanti (2022), menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu Negara untuk tumbuh menurut derat ukur yaitu dua kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita akan cenderung turun menjadi sangat rendah,

yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit di atas subsisten yaitu pendapatan yang hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sekedar untuk hidup.

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah maka bisa jadi akan semakin banyak pula masyarakat yang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan hal ini dikarenakan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mencukupi untuk jumlah penduduk yang semakin bertambah setiaptahunnya. Sedangkan kependudukan adalah suatu hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social, budaya agama serta lingkungan penduduk dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk (Suhadi & Setyowati, 2022).

Angka pertumbuhan penduduk adalah tingkat pertambahan penduduk suatu wilayah atau Negara dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Nilai pertumbuhan penduduk (NPP) merupakan nilai kecil dimana jumlah individu dalam sebuah populasi meningkat. Nilai pertumbuhan penduduk (NPP) hanya merujuk pada perubahan populasi periode waktu unit, sering diartikan sebagai persentase jumlah individu dalam populasi ketika dimulai periode (Aswanto, 2022).

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta usaha untuk membangun suatu perekonomian karena penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu: fertilitas, mortalitas dan migrasi (Todaro dan Smith, 2006).

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah pelaksanaan pembangunan itu sendiri, namun demikian penduduk Indonesia menurut strukturnya berbeda dengan struktur negara yang lebih maju. Struktur penduduk Indonesia dikatakan masih muda, atau sebagian besar penduduk Indonesia berusia muda. Mengingat hanya orang dewasa saja yang bisa bekerja, dan pada umumnya dalam suatu keluarga hanya ada satu yang bekerja berarti bahwa untuk setiap orang yang bekerja harus menanggung beban hidup dari anggota keluarga dari yang cukup besar. Makin banyak orang yang harus ditanggung oleh setiap orang yang bekerja makin rendah kesejahteraan penduduk (Saputri, 2019).

2.1.2.4. Teori Jumlah Penduduk

Menurut Todaro dan Smith (2006), pertumbuhan penduduk dapat diperoleh dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$P_t = P_o + (B - D) + (M_i - M_o)$$

Di mana:

P_o = jumlah penduduk pada waktu terdahulu (tahun dasar).

P_t = jumlah penduduk pada waktu sesudahnya (tahun ke t).

B = kelahiran yang terjadi pada jangka waktu antara dua kejadian tersebut.

D = kematian yang terjadi pada jangka waktu antara dua kejadian tersebut.

Mo = migrasi keluar pada jangka waktu antara kedua kejadian tersebut.

Mi = migrasi masuk pada jangka waktu antara kedua kejadian tersebut.

Dalam teori penduduk, Malthus menyatakan bahwa jumlah penduduk akan melampaui jumlah persediaan bahan pangan yang dibutuhkan. Selanjutnya Malthus sangat prihatin bahwa jangka waktu yang dibutuhkan oleh penduduk untuk berlipat dua jumlahnya sangat pendek, ia melukiskan bahwa apabila tidak dilakukan pembatasan, penduduk cenderung berkembang menurut deret ukur. Sehingga, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan persediaan bahan pangan. Dalam waktu 200 tahun, perbandingan itu akan menjadi 256 : 9 (Diyanti, 2022).

Sadler dalam Aswanto (2021), mengemukakan bahwa daya reproduksi manusia dibatasi oleh jumlah penduduk yang ada di suatu negara atau wilayah. Jika kepadatan penduduk tinggi, daya reproduksi manusia akan menurun. Sebaliknya jika kepadatan penduduk rendah, maka daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan bahan makanan yang tersedia. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya yang dilakukan, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya penambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja yang baru sangat terbatas.

2.1.3. Upah Minimum Regional

2.1.3.1. Pengertian Upah Minimum

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, disebutkan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan bahwa Pemerintah dalam hal ini Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau bupati/walikota, menetapkan upah minimum berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak dan perlindungan pengupahan, penetapan upah minimum dan pengenaan denda terhadap pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaian diatur dengan peraturan pemerintah (Putra, 2017).

Upah minimum diarahkan kepada pencapaian KHL yaitu setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarnya ditetapkan Menaker (Menteri Tenaga Kerja). Pencapaian KHL perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh kemampuan dunia usaha (Dewi dan Setyowati, 2022).

Adapun penggolongan upah minimum dibedakan menurut kategori sebagai berikut:

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota (Dewi dan Setyowati, 2022).

Menurut Yuni dan Elviera (2020), upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional, dan tidak boleh rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan. Penetapan upah minimum perlu mempertimbangkan beberapa hal secara komprehensif. Dasar pertimbangan menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER01/MEN/1999 sebagai berikut:

- a. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan mempertimbangkan: a) Kebutuhan Hidup Minimum (KHM); b) Indeks Harga Konsumen (IHK); c) Kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan perusahaan; d) Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah; e) Kondisi pasar kerja; f) Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita (Siregar & Lubis, 2023).
- b. Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Indonesia. Selain mempertimbangkan pertimbangan umum, penetapan ini juga

memperhatikan kemampuan perusahaan secara sektoral. Jika perusahaan tidak mampu memenuhi ketentuan Upah Minimum, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP-226/MEN/2000 mengatur prosedur penangguhan pelaksanaan Upah Minimum. Pada pasal 19 ayat (2) mengindikasikan bahwa permohonan penangguhan harus diajukan kepada Gubernur melalui instansi terkait. Namun, Gubernur tidak secara otomatis menyetujui permohonan tersebut. Pasal 20 ayat (2) menetapkan bahwa Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk mengaudit keadaan keuangan perusahaan yang mengajukan penangguhan, guna membuktikan ketidakmampuan perusahaan membayar biaya tersebut. Gubernur kemudian akan memutuskan persetujuan atau penolakan penangguhan berdasarkan hasil audit tersebut. Jika disetujui, penangguhan berlaku maksimal selama 1 tahun (Murniati, 2022).

- c. Pengertian Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota. Menurut pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-226/MEN/2000 tentang perubahan pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 8, pasal 11, pasal 20, pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum Provinsi adalah upah yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu Provinsi. Besarnya upah minimum untuk setiap wilayah Provinsi atau kabupaten atau kota tidak sama karena tergantung nilai kebutuhan hidup minimum (KHM) di daerah bersangkutan.

2.1.3.2. Upah Minimum Regional

Pemerintah di banyak Negara selalu berusaha melindungi kelompok yang lemah yaitu para buruh dalam hubungan kerja mereka dengan para pengusaha. Untuk melindungi para buruh pemerintah menentukan Undang-Undang suatu tingkat upah minimum yang boleh dibayar oleh pengusaha kepada pekerjanya. Tingkat upah minimum untuk suatu daerah disebut upah minimum regional (UMR) dan ini berbeda antara daerah satu dengan daerah lain (Chalid dan Yusuf, 2014).

Upah Minimum Regional (UMR) ditentukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KLH), indeks harga konsumen, upah minimum yang berlaku secara regional kemampuan dan tingkat perkembangan perusahaan. Ketentuan UMR seharusnya tidak boleh terlalu jauh menyimpang dari tingkat upah rata-rata yang terjadi di pasar tenaga kerja sebab jika UMR terlalu tinggi maka pengusaha akan sangat berhati-hati dalam memilih tenaga kerja yang digunakan, tenaga kerja akan dipilih yang memang benar-benar produktif dan efisien. Sehingga sebagai akibatnya UMR yang sangat tinggi tersebut akan menimbulkan pengangguran dan UMR hanya melindungi mereka yang sudah bekerja (Benggolo, 2000).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Pengupahan menyebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang

ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya (Benggolo, 2000).

Berikut ini merupakan data Upah Minimum Regional Provinsi Jawa Tengah mulai tahun 2013 - 2024 yang mengalami kenaikan.

Tabel 2.1
Upah Minimum Regional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2024

No	Provinsi	Tahun	Upah Minimum Regional
1	Jawa Tengah	2013	915.782
2	Jawa Tengah	2014	1.069.786
3	Jawa Tengah	2015	1.226.182
4	Jawa Tengah	2016	1.415.553
5	Jawa Tengah	2017	1.547.906
6	Jawa Tengah	2018	1.686.226
7	Jawa Tengah	2019	1.824.395
8	Jawa Tengah	2020	1.980.785
9	Jawa Tengah	2021	2.041.504
10	Jawa Tengah	2022	1.686.226
11	Jawa Tengah	2023	2.052.738
12	Jawa Tengah	2024	2.198.563

Sumber: (<https://Jateng.Bps.Go.Id>, n.d.)

Pada awalnya upah minimum ditentukan secara terpusat oleh Departemen Tenaga Kerja untuk regional atau wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Dalam perkembangan otonomi daerah, kemudian mulai tahun 2001 upah minimum ditetapkan oleh masing-masing provinsi. Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin (Todaro, 2000).

Tujuan penetapan upah minimum dapat dibedakan secara mikro dan makro. Secara mikro tujuan penetapan upah minimum adalah sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot, mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan dan meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah. Sedangkan secara makro, penetapan upah minimum bertujuan untuk pemerataan pendapatan, peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja, perubahan struktur biaya industri sektoral, peningkatan produktivitas kerja nasional, peningkatan etos dan disiplin kerja, dan memperlancar komunikasi pekerja dan pengusaha dalam rangka hubungan *bipartite* (Marliana, 2022).

2.1.4. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.4.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu waktu (Adisasmita, 2013).

Mengacu pada ulasan di atas, dapat diketahui aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu: bagaimana suatu perekonomian berkembang atau

berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek (Hadi dkk., 2022).

Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo. Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang lebih panjang investasi akan menambah stok kapital (Ardian dkk., 2022).

Menurut Kuznets dalam Todaro (2000), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk

menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada. Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi baik legal formal maupun informal (Benggolo, 2000).

Merujuk pada paparan di atas, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi

haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional riil yaitu PNB atau PDB yang dihitung menurut harga- harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB harga tetap yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar.

2.1.4.2. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek (Sahara, 2023).

Menurut Todaro dan Smith (2006), pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan, artinya ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lainnya yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia.

Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan PNB atau PDB riil yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui

perkembangan pertumbuhan ekonomi setiap periodenya, dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut (Diyanti, 2022):

$$r(t-1) = \frac{PDRB_t - PDRB(t-1)}{PDRB_t} \times 100\%$$

Keterangan:

$r(t-1)$ = Tingkat pertumbuhan ekonomi

$PDRB_t$ = Produk domestik regional bruto tahun yang dihitung

$PDRB(t-1)$ = Produk domestik regional bruto tahun sebelumnya

2.1.4.3. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Indikator pertumbuhan ekonomi sebagaimana teori yang dikemukakan Adisasmita (2013), ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakseimbangan Pendapatan Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas menerima 20 persen total pendapatan. Indikator ketidak seimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.
- b. Perubahan Struktur Perekonomian Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecendrungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri

memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor (Adisasmita, 2013).

- c. **Pertumbuhan Kesempatan Kerja** Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis financial Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah.
- d. **Tingkat dan Penyebaran Kemudahan** Dalam hal ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya).
- e. **Produk Domestik Regional Bruto** Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran

prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi (Adisasmita, 2013).

2.1.5. Investasi

2.1.5.1. Pengertian Investasi

Investasi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi, karena berperan langsung dalam menciptakan kapasitas produksi baru, mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja. Dalam pengertian makroekonomi, investasi merujuk pada pengeluaran sektor swasta atau pemerintah untuk pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, infrastruktur, dan bangunan yang akan digunakan dalam proses produksi jangka panjang (Mankiw, 2018).

Investasi adalah pengorbanan sumber daya (waktu, uang, dan usaha) hari ini dengan harapan mendapatkan lebih banyak sumber daya dikemudian hari (Laopodis, 2021). Berdasarkan perspektif ini, investasi dapat dipahami sebagai pengorbanan yang saat ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan investasi adalah untuk menghasilkan pendapatan atau apresiasi melalui perolehan aset atau barang (Hayes, 2022). Nilai suatu aset cenderung meningkat dari waktu ke waktu karena terapresiasi. Orang yang membeli barang sebagai investasi tidak melakukannya dengan maksud menggunakannya untuk konsumsi, melainkan untuk menghasilkan kekayaan di masa depan.

Secara teoritis, investasi dapat dijelaskan melalui teori akselerator dan teori Keynesian. Teori akselerator menyatakan bahwa peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui investasi. Sementara itu, menurut teori Keynesian, investasi ditentukan oleh tingkat bunga dan ekspektasi keuntungan masa depan. Apabila ekspektasi keuntungan tinggi dan suku bunga rendah, maka investasi akan meningkat, dan ini berpotensi memperluas kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran (Samuelson dan Nordhaus, 2010).

2.1.5.2. Peran investasi dalam pembangunan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

Dalam konteks pasar tenaga kerja, investasi menjadi determinan penting yang mampu meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja. Masuknya investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) maupun investasi domestik dapat memperluas sektor produksi dan mendorong pembukaan lapangan kerja baru. Investasi juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui transfer teknologi dan pelatihan kerja, sehingga mendorong efisiensi tenaga kerja yang lebih tinggi (Todaro dan Smith, 2006).

Hasil penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa investasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap penurunan pengangguran. Studi oleh Dewi dan Santosa (2021) dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia mengungkapkan bahwa peningkatan investasi, khususnya di sektor manufaktur dan infrastruktur, secara signifikan mampu menekan

angka pengangguran terbuka di beberapa provinsi. Sementara itu, Santika dan Lestari (2019) menemukan bahwa pengaruh investasi terhadap pengangguran juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan tenaga kerja dan efektivitas regulasi di tingkat daerah.

Di Provinsi Jawa Tengah, arus investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) terus mengalami peningkatan selama periode 2013 - 2024. Beberapa kawasan industri seperti di Kendal, Batang, dan Semarang menjadi destinasi strategis bagi investor. Namun, peningkatan investasi ini belum sepenuhnya diiringi dengan penurunan signifikan dalam tingkat pengangguran terbuka. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan mismatch antara jenis investasi yang masuk dengan kebutuhan tenaga kerja lokal, atau adanya kendala struktural lainnya yang menghambat penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, analisis empiris terhadap pengaruh investasi terhadap pengangguran di wilayah ini menjadi penting untuk dilakukan.

2.1.6. Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian merujuk pada penelitian terdahulu yang relevan. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yuliana (2019)	Variabel independen: • Upah minimum regional • Laju pertumbuhan ekonomi • Tingkat upah minimum regional Variabel dependen: • Tingkat pengangguran terbuka	a. Upah minimum regional (X1) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh tahun 1984-2018. Hal tersebut dapat dilihat bahwa nilai t hitung 3,378 lebih besar dari t tabel sebesar 2.03011 dengan taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,002. Dikarenakan kurangnya minat masyarakat Provinsi Aceh dalam bekerja dengan upah yang sedikit. b. Laju pertumbuhan ekonomi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh tahun 1984-2018. Hal tersebut dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar -0. 1.144261 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2.03011 dengan taraf signifikansi 0.261 lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan 0.05. c. Tingkat upah minimum regional (X1) dan laju pertumbuhan ekonomi (X2) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh tahun 1984-2018. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai F hitung sebesar 6.624 lebih besar dari nilai f tabel yaitu 3.19

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2	Diyanti (2022)	Variabel independen: • Tingkat pertumbuhan ekonomi • Inflasi • Tingkat upah atau UMR a. Jumlah penduduk Variabel dependen: • Tingkat pengangguran terbuka	dengan signifikansi f hitung sebesar 0.004. lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan yaitu sebesar 0.05. a. Tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di enam kota SBH tahun 2014-2020, karena pada saat tingkat pertumbuhan ekonomi naik maka kesempatan kerja akan bertambah dan membuat banyak angkatan kerja yang terserap dalam angkatan kerja. b. Inflasi memperoleh hasil tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di enam kota SBH Jawa Tengah pada tahun 2014-2020, karena seperti yang dijelaskan pada kurva philips jangka panjang dimana perusahaan mempunyai batas maksimum dalam produksi jadi yang akan terjadi adalah inflasi akan tetap naik namun penganggurannya tetap. c. Tingkat upah atau UMR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di enam kota SBH Jawa Tengah tahun pada 2014-2020, karena pada saat upah naik akan menjadi motivasi masyarakat untuk bekerja/mencari pekerjaan/menerima pekerjaan yang ada dan tidak pilih-pilih dalam bekerja. d. Jumlah penduduk mendapat hasil tidak berpengaruh terhadap pengangguran di enam kota SBH Jawa Tengah pada tahun 2014-2020, karena jumlah penduduk yang bertambah bisa disebabkan karena angka kelahiran yang bertambah dan bukan termasuk dalam angkatan kerja atau orang yang migrasi karena tugas untuk pindah tempat kerja.
3	Marliana (2022)	Variabel independen: • Indeks pembangunan manusia,	a. Indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4	Tumilaar dkk. (2022)	• Pertumbuhan ekonomi • Upah minimum Variabel dependen: • Tingkat pengangguran terbuka	pengangguran terbuka karena semakin tinggi kualitas pendidikan masyarakat maka masyarakat lebih selektif dalam memilih jenis pekerjaan dan upah pekerjaan yang akan didapat sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mereka mendapatkan pekerjaan lebih lama.
		Variabel independen: • Jumlah penduduk • Pendidikan • Upah minimum Variabel dependen: • Tingkat pengangguran terbuka	b. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. c. Upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. d. Indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum bersama-sama mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. a. Secara parsial jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. b. Secara parsial pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. c. Secara parsial upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. d. Secara simultan variabel jumlah penduduk, pendidikan, dan upah minimum berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.
5	Sahara (2023)	Variabel independen: • Pertumbuhan ekonomi • Jumlah penduduk	a. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat artinya semakin meningkat pertumbuhan ekonomi maka semakin

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
6	Aswanto (2022)	• Inflasi • Upah minimum Variabel dependen: • Tingkat pengangguran terbuka	a. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat. b. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat. c. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat. d. Upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat artinya semakin meningkat upah minimum provinsi maka semakin menurun tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat. e. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka dapat dijelaskan oleh variabel independen terdiri dari pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, inflasi dan upah minimum provinsi sebesar 52.7 persen.
		Variabel independen: • Jumlah Penduduk • Upah minimum regional Variabel dependen: • Tingkat pengangguran terbuka	a. Jumlah Penduduk menunjukkan bahwa berpengaruh negative dan signifikan, dengan nilai signifikasinya sebesar 0,01 terhadap pengangguran di Riau dengan nilai (-0,58) artinya ketika jumlah penduduk meningkat maka jumlah pengangguran akan berkurang begitu juga sebaliknya. b. Upah minimum regional menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikasinya sebesar 0,009 terhadap jumlah pengangguran di Riau dengan nilai (0,49) artinya ketika upah minimum regional meningkat maka jumlah pengangguran akan bertambah, begitu juga ketika jumlah pengangguran
7	Suhadi dan Setyowati (2022)	Variabel independen: • Pendidikan • Upah minimum	c. Secara parsial variabel Pendidikan (EDUC), Upah Minimum (UMK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
8	Murniati (2022)	regional • Produk Domestik Regional Bruto Variabel dependen: • Tingkat pengangguran terbuka	(TPT), Sedangkan variabel Jumlah Penduduk (P0) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. d. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan daya ramal atau kebaikan dari model terestimasi sebesar 0,9251. Artinya, sebesar 92,51 persen variasi perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat dijelaskan oleh variasi Log(PO), ED, Log(UMK), dan Log(PDRB) . Sementara sisanya, yaitu sebesar 7,49 persen dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak diikutsertakan ke dalam model. e. Berdasarkan hasil konstanta effect yang memiliki konstanta rendah berada di Kabupaten Pangandaran dengan nilai konstanta 333,83702, yang artinya Kabupaten pangandaran memiliki tingkat pengangguran terbuka paling rendah sedangkan yang memiliki konstanta tinggi berada di Kota Bandung dengan nilai konstanta 396,76334 yang artinya Kabupaten pangandaran memiliki tingkat pengangguran terbuka paling rendah.
		Variabel independen: • Pertumbuhan Ekonomi • Indeks Pembangunan Manusia • Upah minimum regional Variabel mediasi: • Jumlah Investasi Variabel dependen: • Tingkat pengangguran	a. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) mempunyai nilai sebesar sig sebesar 0.769 menunjukkan jika variabel pertumbuhan ekonomi (X1) secara langsung berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Nilai koefisien regresi bernilai negatif menunjukkan jika peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Malang. b. Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran Variabel indeks pembangunan manusia (X2) mempunyai nilai sebesar sig sebesar 0.131 menunjukkan jika

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		terbuka	variabel indeks pembangunan manusia (X2) secara langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Nilai koefisien regresi bernilai negatif menunjukkan jika peningkatan indeks pembangunan manusia akan menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Malang. c. Pengaruh Upah Minimum Regional terhadap tingkat pengangguran Variabel Upah Minimum Regional (X3) mempunyai nilai sebesar sig sebesar 0.141 menunjukkan jika variabel Upah Minimum Regional (X3) secara langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Nilai koefisien regresi bernilai positif menunjukkan jika peningkatan Upah Minimum Regional akan meningkatkan tingkat pengangguran di Kabupaten Malang. d. Pengaruh jumlah investasi terhadap tingkat pengangguran Variabel jumlah investasi (Y1) mempunyai nilai sebesar sig sebesar 0.528 menunjukkan jika variabel jumlah investasi secara langsung berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Nilai koefisien regresi bernilai positif menunjukkan jika peningkatan jumlah investasi akan menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Malang.
9	Siregar dan Lubis (2023)	Variabel independen: • Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto • Upah minimum regional • Tingkat pengangguran	a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2017-2021. b. Upah Minimum Regional (UMR) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2017-2021. c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
10	Hendaryanto (2018)	terbuka Variabel dependen: • Kesejahteraan Variabel independen: • Upah minimum regional • Pertumbuhan ekonomi • Jumlah penduduk • Inflasi Variabel dependen: • Tingkat pengangguran terbuka	signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2017-2021. d. PDRB, UMR dan TPT secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2017-2021. a. Upah minimum regional kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indeks pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Ini berarti setiap kenaikan upah minimum regional akan meningkatkan pengangguran terbuka di Jawa Tengah. b. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak menyebabkan kenaikan pengangguran di Jawa Tengah. c. Jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indeks pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Ini berarti setiap ada kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan pengangguran terbuka di Jawa Tengah. d. Inflasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Sehingga kenaikan inflasi tidak menyebabkan kenaikan pengangguran terbuka di Jawa Tengah.
11	Horvath dan Yang (2022)	Variabel independen: • Unemployment Dynamics • Informality	<i>Despite the typically more pronounced aggregate fluctuations in emerging market economies (EMEs), this paper documents that EMEs exhibit lower relative volatility and countercyclicality of the unemployment rate than small open advanced economies. We link</i>

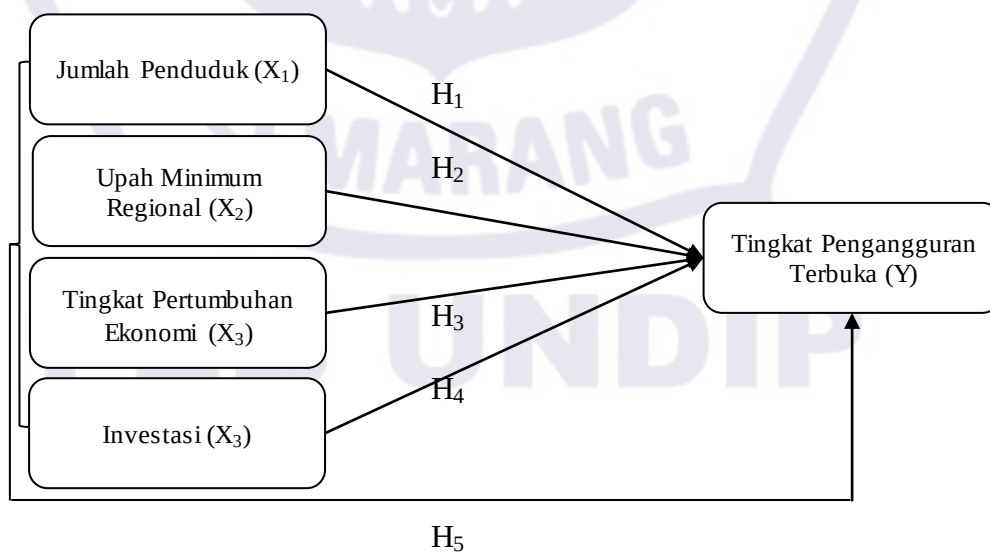
No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
12	Alfalih (2024)	Variabel dependen: • <i>Small Open Economies</i> Variabel independen: • <i>Oil Prices</i> • <i>Foreign Investment</i> • <i>Trade Openness</i> Variabel dependen: • <i>Unemployment Rates</i>	<i>these differences to the larger informal economy in EMEs. We build a small open economy model that combines a formal sector featuring labor search frictions with a frictionless informal sector. A larger informal sector amplifies the impact of productivity and interest rate shocks on formal output, consumption, and employment, while dampening their impact on unemployment. Varying the degree of informality explains a significant fraction of differences in unemployment dynamics across small open economies.</i> <i>Findings show that changes in the four variables exhibit a significant negative long-run effect on the unemployment rate. Additionally, we detected a non-linear relationship between unemployment and oil prices. The oil price effect is positive only if it exceeds \$41.2 per barrel. A per-barrel price of oil below this threshold appears to worsen the labor market situation in Saudi Arabia. Revenues from oil exports account for major source of income for the country; unfortunately, oil prices are subject to factors beyond the control of the country (inconsistencies in global oil prices). The country needs to diversify its economy especially in growth-enhancing sectors of the economy to generate employment and moderate unemployment.</i>

Sumber: Disarikan dari beberapa jurnal

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel dependen dan variabel independen yang digunakan. Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka. Namun dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan pada hasil penelitian yang diperoleh. Penelitian ini dilakukan dengan menambahkan beberapa variabel yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, dan diterapkan pada dimensi waktu serta tempat yang berbeda. Perbedaan dengan penelitian terdahulu, penelitian menggunakan variabel independen jumlah penduduk, upah minimum regional, tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi.

2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dibuat model penelitian dalam bentuk bagan 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis

Perumusan hipotesis dapat dikembangkan berdasarkan hubungan antara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka dalam penelitian ini, yaitu: jumlah penduduk, upah minimum regional, tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi.

2.3.1. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran

Terbuka

Jumlah penduduk yang padat akan mempengaruhi tingkat pengangguran karena dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, maka jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja juga ikut meningkat. Angkatan kerja membutuhkan lapangan pekerjaan dan umumnya di negara berkembang laju pertumbuhan penduduk (termasuk angkatan kerja) lebih besar daripada laju pertumbuhan lapangan kerja.

Penjelasan di atas juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahara (2023), menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah:

H₁: jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka.

2.3.2. Pengaruh Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat

Pengangguran Terbuka

Tujuan penetapan upah minimum yaitu untuk pemerataan pendapatan, peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja. Semakin tinggi upah minimum regional suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya. Oleh karena itu, upah minimum regional menjadi salah satu indikator tingkat pengangguran terbuka suatu wilayah/daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tumilaar dkk. (2022), menemukan bahwa upah minimum regional berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah:

H₂: upah minimum regional berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka.

2.3.3. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat

Pengangguran Terbuka

Meningkatnya pertumbuhan perekonomian dapat berakibat pada naiknya lapangan pekerjaan. Akan tetapi, semakin sedikitnya lapangan kerja yang disediakan mengakibatkan banyaknya golongan angkatan kerja tak dapat terserap pada jumlah yang tinggi. Situasi itu dapat berakibat meningkatnya tingkat pengangguran. Pertumbuhan perekonomian dapat semakin memberi pengaruh dengan tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diselaraskan dengan kenaikan produksi bisa

menciptakan pengangguran tetap mengalami peningkatan sejalan terhadap ekonomi yang kian bertumbuh.

Penjelasan di atas juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendaryanto (2018), dan Yuliana (2019), menemukan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada tidak terdapat hubungan dengan permintaan tenaga kerja, atau kebijakan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tersebut menanggulangi karena pertumbuhan yang terjadi pada sektor yang padat modal bukan pada sektor yang padat karya sehingga tidak mempengaruhi tingkat pengangguran sehingga pertumbuhan ekonomi tidak signifikan berpengaruh terhadap pengangguran terbuka.

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah:

H₃: tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka.

2.3.4. Pengaruh Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam kerangka teori investasi dan pertumbuhan, seperti dijelaskan dalam model Harrod-Domar, investasi merupakan motor penggerak utama penciptaan kapasitas produksi dan tenaga kerja. Investasi langsung, baik dalam bentuk PMDN maupun PMA, akan mendorong pembangunan infrastruktur, ekspansi industri, dan penciptaan lapangan kerja.

Hasil penelitian oleh Putri dan Wicaksono (2021) menunjukkan bahwa peningkatan investasi di sektor industri pengolahan dan jasa di Jawa Tengah secara signifikan menurunkan angka pengangguran terbuka.

Penelitian serupa oleh Hidayat dan Rosdiana (2020) menegaskan bahwa arus masuk investasi asing memiliki dampak jangka panjang dalam mengurangi TPT, terutama di kawasan industri seperti Kendal dan Batang.

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah:

H₄: Investasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka.

2.3.5. Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Regional, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi Secara Bersama-Sama Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Para pengangguran memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada pendapatan nasional, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional dalam perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan *output* nasional. Upah minimum regional dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka, dikarenakan ketika upah naik maka *output* yang dikeluarkan juga naik maka perusahaan akan menambah tenaga kerja.

Penjelasan di atas juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2022), menemukan bahwa Jumlah Penduduk, Upah Minimum Regional, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Tingkat pengangguran

terbuka. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₅: Jumlah Penduduk, Upah Minimum Regional, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Sugiyono (2018), mendefinisikan data sekunder adalah jenis data yang didapatkan dari sumber terkait dan bukan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder karena data yang didapatkan tidak langsung atau data yang didapatkan oleh peneliti berasal dari sumber terkait yaitu Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *time series*, mencakup periode 2013 – 2024 dan meliputi variabel-variabel seperti: jumlah penduduk, upah minimum regional, tingkat pertumbuhan ekonomi, investasi dan tingkat pengangguran terbuka.

3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.2.1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka (Y), yaitu: persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada (Wati et al., 2024).

3.2.2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi: jumlah penduduk (X_1), upah minimum regional (X_2), tingkat pertumbuhan ekonomi (X_3) dan investasi (X_4). Adapun penjelasan tentang variabel independen dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.2.1.1 Jumlah Penduduk

Yang dimaksud dengan jumlah penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi (Anggrain, 2021).

3.2.1.2 Upah Minimum Regional

Menurut Yuliana (2019), upah minimum regional merupakan upah yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu Provinsi. Besarnya upah minimum untuk setiap wilayah Provinsi atau kabupaten atau kota tidak sama karena tergantung nilai kebutuhan hidup minimum (KHM) di daerah bersangkutan. Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota.

3.2.1.3 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas

tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada (Todaro, 2000).

3.2.1.4 Investasi

Dalam pengertian makroekonomi, investasi merujuk pada pengeluaran sektor swasta atau pemerintah untuk pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, infrastruktur, dan bangunan yang akan digunakan dalam proses produksi jangka panjang (Mankiw, 2018). Investasi merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Peningkatan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dapat menciptakan peluang lapangan kerja yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan tenaga kerja. Semakin besar investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, maka akan semakin besar pula peluang penciptaan lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek, yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya berupa orang, tetapi juga bisa berupa objek ataupun

benda-benda alam, populasi juga bukan hanya jumlah yang ada pada subjek atau objek yang dipelajari, namun meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah data jumlah penduduk, upah minimum regional, tingkat pertumbuhan ekonomi, investasi dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013–2024.

3.3.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari karakteristik dan jumlah yang dimiliki populasi, pengambilan sampel ini dilakukan apabila peneliti tidak mungkin mempelajari keseluruhan populasi, dikarenakan keterbatasan waktu, biaya, tenaga, ataupun faktor lain, sehingga peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut, dengan syarat sampel yang diambil haruslah *representative* (mewakili dari populasi), sedangkan *sampling* merupakan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel (Sugiyono, 2018). Sampel pada penelitian ini adalah data jumlah penduduk, upah minimum regional, tingkat pertumbuhan ekonomi, investasi dan tingkat pengangguran terbuka dari Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Tengah pada Tahun 2013 - 2024.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data jumlah penduduk, upah minimum regional, tingkat pertumbuhan ekonomi, investasi dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa

Tengah. Data-data tersebut diperoleh dari situs BPS, yaitu: (<https://www.bps.go.id/>, n.d.) dan (https://jateng.bps.go.id, n.d.).

Pada penelitian ini data *time series* tahunan mulai tahun 2013 sampai tahun 2024. Data penelitian berasal dari dokumentasi Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, berita atau artikel dan data di internet yang masih sejalan dengan penelitian ini. Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah skala rasio, Skala ini memiliki titik nol mutlak yang sebenarnya, sehingga bisa diketahui jelas rasio atau perbandingan antar kategorinya (Ghozali, 2018).

3.5. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengolah literatur, artikel, jurnal maupun media tertulis lain yang berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian ini. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter seperti laporan keuangan perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

3.6. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik data dengan *MS Office 365* dan program *EViews 13*. Analisis statistik berisi penjabaran mengenai metode yang akan digunakan dalam menentukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta tingkat signifikansinya.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Metode statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018). Dengan menggunakan statistik deskriptif maka dapat diketahui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum (Ghozali, 2018). Dari variabel-variabel yang digunakan didalam penelitian ini, statistic deskriptif digunakan untuk menganalisa data kuantitatif yang diolah dengan menggunakan program *EViews 13* sehingga dapat memberi penjelasan mengenai kondisi perusahaan selama tahun 2013-2024.

3.6.2 Model Estimasi Regresi Data Panel

Metode analisis regresi data panel digunakan untuk menguji hubungan linier antara variabel independen (jumlah penduduk, UMR, tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi) dengan variabel dependen (tingkat pengangguran terbuka). Teknik data panel yaitu dengan menggabungkan jenis data *cross-section* dan *time series*, memberikan beberapa keunggulan dibandingkan dengan pendekatan standar *cross-section* dan *time series* yaitu:

1. Dengan menggabungkan data *time series* dan *cross section*, maka data panel memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, tingkat kolinearitas antar variabel yang rendah, lebih besar *degree of freedom*, dan lebih efisien.

2. Dengan menganalisis data *cross-section* dalam beberapa periode maka data panel tepat digunakan dalam penelitian perubahan dinamis (*dynamic change*).
3. Data panel mampu mendeteksi dan mengukur pengaruh yang tidak dapat diobservasi melalui data murni *time series* atau murni data *cross-section*.
4. Data panel memungkinkan kita mempelajari model perilaku yang lebih kompleks. Misalkan fenomena skala ekonomis dan perubahan teknologi dapat dipahami lebih baik dengan data panel daripada murni data *cross-section* atau murni data *time series*.
5. Oleh karena data panel berhubungan dengan individu, perusahaan, kota, negara dan sebagainya sepanjang waktu (*over time*) maka akan bersifat heterogen dalam unit tersebut. Teknik untuk mengestimasi data panel dapat memasukkan heterogenitas secara eksplisit untuk setiap variabel individu secara spesifik

3.6.3 Pemilihan Model Data Panel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji LM untuk menentukan model regresi data panel yang sesuai.

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah model FEM lebih baik dari model CEM. Uji Chow menguji signifikansi intersep α_i apakah berbeda-beda pada masing-masing sektor (FEM) atau tidak berbeda (CEM). Menurut Widarjono (2009) Uji Chow bertujuan untuk

menentukan menggunakan model yang terbaik antara *Common Effect Model (CEM)* atau *Fixed Effect Model (FEM)* dalam mengestimasi data panel. *Chow test* merupakan uji untuk membandingkan model *common effect* dengan *fixed effect*.

Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas untuk *cross section none* $>$ nilai signifikan 0,05 maka H_0 diterima, maka model yang tepat digunakan adalah *Common effect model (CEM)*.
- b. Jika nilai probabilitas untuk *cross section none* $<$ nilai signifikan 0,05 maka H_0 ditolak, maka model yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Sehingga dalam pengujian memiliki hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common effect model (CEM)* (Nilai probabilitas $>$ 0,05)

H_1 : *Fixed effect model (FEM)* (Nilai probabilitas $<$ 0,05)

2. Uji Hausman

Menurut Widarjono (2018) uji Hausman dilakukan bila *fixed effect model* yang dipilih. Uji Hausman digunakan untuk memilih *fixed effect model* atau *random effect model* yang paling tepat untuk digunakan dalam mengestimasi data panel. Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya, maka H_0 ditolak dan model yang tepat digunakan adalah *random effect model*, dan sebaliknya.

Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas untuk *cross section fixed* $>$ nilai signifikan 0,05 maka H_0 diterima, maka model yang tepat digunakan adalah *Random Effect Model (REM)*.
- b. Jika nilai probabilitas untuk *cross section fixed* $<$ nilai signifikan 0,05 maka H_0 ditolak, maka model yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Sehingga dalam pengujian memiliki hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Random effect model (REM)* (Nilai probabilitas $>$ 0,05)

H_1 : *Fixed effect model (FEM)* (Nilai probabilitas $<$ 0,05)

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Lagrange Multiplier Test adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan *common effect* atau *random effect*. Tujuan *Lagrange Multiplier Test* dengan *EViews* ini harus dilakukan jika hasil uji Chow dan Hausman merekomendasikan model yang berbeda.

Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas untuk *cross section random* $>$ nilai signifikan 0,05 maka H_0 diterima, maka model yang tepat digunakan adalah *random effect model (REM)*.

- b. Jika nilai probabilitas untuk cross section random $<$ nilai signifikan 0,05 maka H_0 ditolak, maka model yang tepat digunakan adalah *fixed effect model (FEM)*.

Sehingga dalam pengujian memiliki hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common effect model (CEM)* (Nilai probabilitas $>$ 0,05)

H_1 : *Random effect model (REM)* (Nilai probabilitas $<$ 0,05)

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2018), apabila asumsi klasik terpenuhi maka estimasi regresi dengan *ordinary least square (OLS)* akan *BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)*, artinya pengambilan keputusan melalui Uji f dan Uji t tidak boleh bias. Dalam penelitian ini terdapat beberapa uji asumsi klasik antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, uji korelasi & cross section, uji heterokedastisitas & cross section. Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien. Berikut adalah penjelasan uji asumsi klasik:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas perlu dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam analisis multivariat, para peneliti menggunakan pedoman kalau setiap variabel terdiri dari 30 data, maka data sudah berdistribusi normal. Meskipun demikian,

untuk menguji dengan lebih akurat, diperlukan alat analisis untuk menguji normalitas data (Winarno, 2011).

Pada prinsipnya, uji normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau melihat histogram dari residualnya dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: (Ghozali, 2018).

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, maka pola berdistribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau grafis histogram, maka pola tidak berdistribusi normal sehingga model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Selain dengan grafik atau histogram, uji normalitas dapat dilakukan dengan uji Jarque-Bera dalam aplikasi *EViews*. Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini mengukur perbedaan antara skewness dan kurtosis data.

Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dapat dilihat dengan membandingkan nilai Probabilitas J-B (Jarque-Bera) hitung dengan tingkat α 0,05 (5%). Apabila nilai Prob. J-B hitung lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai prob. J-B hitung lebih kecil dari 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal (Mansuri, 2016).

2. Uji Multikolenieritas

Menurut Ghozali (2018), uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya bebas dari permasalahan multikolinieritas. Kriteria yang digunakan dalam uji multikolinieritas adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 , maka tidak terjadi permasalahan multikolinieritas (model regresi tersebut baik).
- b. Jika nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* > 10 , maka terjadi permasalahan multikolinieritas.

3. Uji Heterokedastisitas

Dalam persamaan regresi perlu juga diuji mengenai sama atau tidaknya varians dari residual observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama disebut terjadi homokedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut terjadi heterokedastisitas. Persamaan regresi yang baik adalah Homokedastisitas dan tidak terjadi Heterokedastisitas (Suntoyo, 2007). Karena penelitian ini menggunakan analisis multivariat maka uji heterokedastisitas varian dan kovarian menggunakan *Box's M test*. Terdapat dua uji heterokedastisitas, yaitu *period* dan *cross section*.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi

antara residual pada satu pengamatan dan pengamatan lain pada model regresi. Fenomena ini umum ditemukan pada regresi data yang bersifat time series, tetapi kadang juga ditemukan pada data cross section (Ariefianto, 2012).

Menurut Suntoyo (2007) persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linier antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya). Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson (DW)* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak terjadi autokorelasi positif, jika $0 < d < dL$
- b. Tidak terjadi autokorelasi positif, jika $dL < d < dU$
- c. Tidak terjadi korelasi negatif, jika $4 - dL < d < 4$
- d. Tidak terjadi korelasi negatif, jika $4 - dU < d < 4 < dL$
- e. Tidak terjadi autokorelasi, jika $dU < d < 4 < dL$

3.6.5 Analisis Regresi

Metode Analisis yang digunakan untuk menilai variabilitas tingkat pengangguran terbuka adalah menggunakan regresi multivariat. Uji regresi bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk, upah minimum regional, tingkat

pertumbuhan ekonomi dan investasi. Sementara variabel dependennya yaitu: tingkat pengangguran terbuka. Apabila p -value lebih kecil ($<$) atau sama dengan α , maka hipotesis nol ditolak, yang berarti bahwa hasil penelitian secara statistik adalah signifikan. Tapi jika nilai p -value lebih besar dari α , maka peneliti gagal menolak hipotesis nol, yang berarti penelitian secara statistik tidak signifikan. Analisis regresi multivariat ini diolah dengan program *EViews 13*.

Adapun analisis regresi pada penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = tingkat pengangguran terbuka

X_1 = jumlah penduduk

X_2 = upah minimum regional

X_3 = tingkat pertumbuhan ekonomi

X_4 = investasi

α = konstanta

β_1 = konstanta jumlah penduduk

β_2 = konstanta upah minimum regional

β_3 = konstanta tingkat pertumbuhan ekonomi

β_4 = konstanta investasi

e = eror

3.6.6 Uji Hipotesis

Menurut Ghozali (2018), hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang masih bersifat teoritis dan perlu diuji kebenarannya melalui data empiris. Dalam pengujian hipotesis, Ghozali (2018) menjelaskan berbagai jenis uji statistik, seperti uji t (untuk menguji pengaruh variabel tunggal), uji F (untuk menguji pengaruh bersama-sama beberapa variabel), dan uji lainnya yang relevan dengan jenis penelitian yang dilakukan.

1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2018), uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Langkah-langkah dalam menguji uji signifikan parameter individual (uji statistik t) yaitu sebagai berikut:

a. Merumuskan Hipotesis

- 1) $H_0: \beta_1 = 0$ artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) $H_a: \beta_1 \neq 0$ artinya variabel independen secara parsial berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

b. Menentukan Tingkat Signifikan

Tingkat signifikan pada penelitian ini dilakukan dengan level (α) 1% (0,01), 5% (0,05) dan 10% (0,10).

c. Pengambilan Keputusan

- 1) Jika probabilitas ($\text{sig } t$) $> \alpha$ maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Jika probabilitas ($\text{sig } t$) $< \alpha$ maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Uji Kelayakan Model

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018), koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka nilai R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 pada

saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2018).

b. Uji F

Uji F adalah uji yang mengukur besarnya perbedaan variance antara kedua atau beberapa kelompok. F Hitung adalah nilai F hasil perhitungan analisis, yang kemudian nilainya akan dibandingkan dengan F Tabel pada Numerator dan Denominator tertentu. Numerator disebut juga dengan *Degree of Freedom 1*, sedangkan Denominator adalah *Degree of Freedom 2*. Misalnya pada Regresi Linear, Nilai Denominator adalah jumlah sampel dikurangi jumlah variabel bebas dikurangi 1. Sedangkan nilai Numerator adalah jumlah variabel bebas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan aspek penting yang menjadi pusat perhatian dalam suatu kajian ilmiah. Dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Tengah yang dianalisis berdasarkan pengaruh beberapa faktor ekonomi, yaitu jumlah penduduk, upah minimum regional, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan investasi selama periode tahun 2013 hingga 2024. Provinsi Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan memiliki dinamika ekonomi yang cukup kompleks serta keragaman wilayah administratif yang mencerminkan kondisi sosial-ekonomi yang heterogen.

Tingkat pengangguran terbuka menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu wilayah karena mencerminkan proporsi angkatan kerja yang belum terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), TPT di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Fluktuasi tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi penawaran tenaga kerja seperti jumlah penduduk dan kualitas SDM, maupun dari sisi permintaan tenaga kerja seperti pertumbuhan ekonomi daerah dan investasi yang masuk. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi sejauh mana faktor-faktor

tersebut memengaruhi kondisi pengangguran di daerah ini agar dapat dirumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Jumlah penduduk di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan total populasi yang besar, Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam penyediaan tenaga kerja. Namun, jika pertumbuhan penduduk tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja yang sebanding, maka akan memicu terjadinya peningkatan angka pengangguran terbuka. Di sisi lain, kebijakan upah minimum regional yang diterapkan di setiap kabupaten/kota dalam provinsi ini juga memberikan dampak yang berbeda terhadap pasar tenaga kerja, tergantung pada daya dukung ekonomi dan sektor usaha dominan di masing-masing wilayah.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian juga menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil diharapkan dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Namun, kenyataannya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal, terutama jika pertumbuhan tersebut lebih ditopang oleh sektor padat modal daripada sektor padat karya. Sementara itu, masuknya investasi baik dari sektor pemerintah maupun swasta diharapkan mampu menjadi katalisator penciptaan lapangan kerja baru. Namun, efektivitas investasi dalam menurunkan angka pengangguran masih menjadi persoalan yang memerlukan kajian empiris.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas faktor-faktor tersebut, maka objek penelitian ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga relevan secara praktis dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan di daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai kondisi pengangguran terbuka di Jawa Tengah serta faktor-faktor yang memengaruhinya secara signifikan selama periode 2013–2024.

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian dalam bentuk nilai-nilai statistik seperti rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum, skewness, serta kurtosis. Adapun hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	X4	Y
Mean	1019599.	1699708.	2.857333	716772.0	5.228690
Median	975541.5	1743500.	2.150000	191385.1	5.010000
Maximum	2087331.	3454827.	14.73000	16418900	11.98000
Minimum	119935.0	830000.0	0.640000	0.000000	1.500000
Std. Dev.	440709.0	487281.0	2.521294	1598329.	1.821247
Skewness	0.049442	0.122954	2.985528	5.018188	0.600693
Kurtosis	2.875581	2.563088	12.40212	36.11831	3.125665
Jarque-Bera	0.442018	4.398856	2170.934	20957.15	25.53456
Probability	0.801710	0.110867	0.611280	0. 241701	0.512673
Sum	4.28E+08	7.14E+08	1200.080	3.01E+08	2196.050
Sum Sq. Dev.	8.14E+13	9.95E+13	2663.551	1.07E+15	1389.799
Observations	420	420	420	420	420

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2025, *EViews 13*

Berdasarkan hasil olahan data menggunakan program *EViews 13*, diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Variabel jumlah penduduk (X1) memiliki rata-rata sebesar 1.019.599 jiwa dengan standar deviasi sebesar 440.709. Nilai minimum sebesar 119.935 dan maksimum sebesar 2.087.331 menunjukkan adanya variasi cukup besar antar kabupaten/kota dan tahun pengamatan. Skewness sebesar 0,049 dan kurtosis sebesar 2,87 menunjukkan bahwa distribusi data mendekati simetris dan normal.
2. Variabel Upah Minimum Regional (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 1.699.708 dengan standar deviasi sebesar 487.281. Distribusi data juga mendekati normal dengan nilai skewness sebesar 0,12 dan kurtosis 2,56.
3. Variabel tingkat pertumbuhan ekonomi (X3) memiliki rata-rata 2,85% dengan standar deviasi sebesar 2,52. Skewness sebesar 2,98 dan kurtosis 12,40 menunjukkan distribusi data yang relatif normal.
4. Variabel investasi (X4) memiliki rata-rata sebesar 716.772 dengan standar deviasi yang tinggi sebesar 1.598.329, serta skewness dan kurtosis yang sangat tinggi, masing-masing sebesar 5,01 dan 36,12, mengindikasikan adanya nilai ekstrem yang perlu diwaspadai dalam penarikan simpulan.
5. Variabel tingkat pengangguran terbuka (Y) memiliki rata-rata sebesar 5,23% dengan standar deviasi 1,82 dan distribusi data yang relatif normal.

4.2.2. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Pemilihan model regresi yang tepat merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam analisis data panel. Dalam penelitian ini, pendekatan data panel digunakan karena mampu menggabungkan dimensi *time series* dan *cross section*, sehingga memberikan keunggulan dalam mengestimasi parameter secara lebih efisien, informatif, dan akurat. Salah satu kelebihan utama dari data panel adalah kemampuannya untuk menangkap dinamika perubahan antar waktu dan perbedaan antar unit observasi, dalam hal ini kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Namun, sebelum melakukan interpretasi terhadap hasil regresi, perlu dilakukan pemilihan model terbaik yang sesuai dengan karakteristik data melalui uji diagnostik model, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM).

1. Uji Chow

Uji Chow yang bertujuan untuk menentukan apakah model yang paling tepat digunakan adalah *Common Effect Model (CEM)* atau *Fixed Effect Model (FEM)*. Adapun hasil uji chow pada penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Cow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	17.574470	(34,381)	0.0000
Cross-section Chi-square	396.166717	34	0.0000

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2025, *EViews 13*

Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000, yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa model *CEM* lebih sesuai ditolak, dan hipotesis alternatif (H_1) yang menyatakan bahwa model *FEM* lebih tepat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model *Fixed Effect* mampu menangkap perbedaan karakteristik unik antar kabupaten/kota yang tidak terobservasi tetapi dianggap konstan sepanjang waktu.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara *Fixed Effect Model* (*FEM*) dan *Random Effect Model* (*REM*). Uji ini bertujuan untuk menguji apakah perbedaan antara *FEM* dan *REM* bersifat signifikan secara statistik. Adapun hasil uji Hausman pada penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.434322	1.652177	0.262879	0.7928
X1	6.20E-06	1.43E-06	4.344026	0.0000
X2	-1.04E-06	1.94E-07	-5.341992	0.0000
X3	0.069051	0.282435	0.244483	0.8070
X4	5.55E-08	4.20E-08	1.322615	0.1868

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2025, *EViews 13*

Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000, yang kembali lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model *Fixed Effect* kembali menjadi model yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini. Keputusan ini memperkuat

hasil dari Uji Chow sebelumnya, dan memberikan justifikasi bahwa pengaruh individual antar kabupaten/kota di Jawa Tengah harus dimasukkan ke dalam model.

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) yang biasanya dilakukan untuk membandingkan antara model *Common Effect* dan *Random Effect*. Meskipun dalam konteks ini model *Common Effect* sudah dieliminasi melalui Uji Chow, uji LM tetap dilakukan sebagai penguat bahwa model *Random Effect* tidak lebih unggul dari *Fixed Effect*. Adapun hasil uji lagrange multiplier (LM) pada penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	708.9463 (0.0000)	82.36920 (0.0000)	791.3155 (0.0000)
Honda	26.62605 (0.0000)	9.075748 (0.0000)	25.24498 (0.0000)
King-Wu	26.62605 (0.0000)	9.075748 (0.0000)	21.05315 (0.0000)
Standardized Honda	27.99147 (0.0000)	10.24172 (0.0000)	22.64614 (0.0000)
Standardized King-Wu	27.99147 (0.0000)	10.24172 (0.0000)	18.82139 (0.0000)
Gourieroux, dkk.	--	--	791.3155 (0.0000)

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2025, *EViews 13*

Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas yang signifikan ($p < 0,05$) untuk semua pendekatan (Breusch-Pagan, Honda, King-Wu,

dan lainnya), sehingga kembali mempertegas bahwa model dengan efek tetap (*Fixed Effect Model*) adalah pilihan terbaik dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel independen (jumlah penduduk, UMR, pertumbuhan ekonomi, dan investasi) dengan variabel dependen (tingkat pengangguran terbuka).

Dengan hasil yang konsisten dari ketiga uji tersebut, maka model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini secara akademik dapat dipertanggungjawabkan. Model *Fixed Effect* dianggap paling sesuai karena mampu mengakomodasi heterogenitas antar unit cross-section, serta memberikan hasil estimasi yang tidak bias dan efisien. Oleh karena itu, seluruh analisis dan interpretasi dalam penelitian ini selanjutnya akan merujuk pada hasil estimasi menggunakan model *Fixed Effect*.

4.2.3. Uji Asumsi Klasik

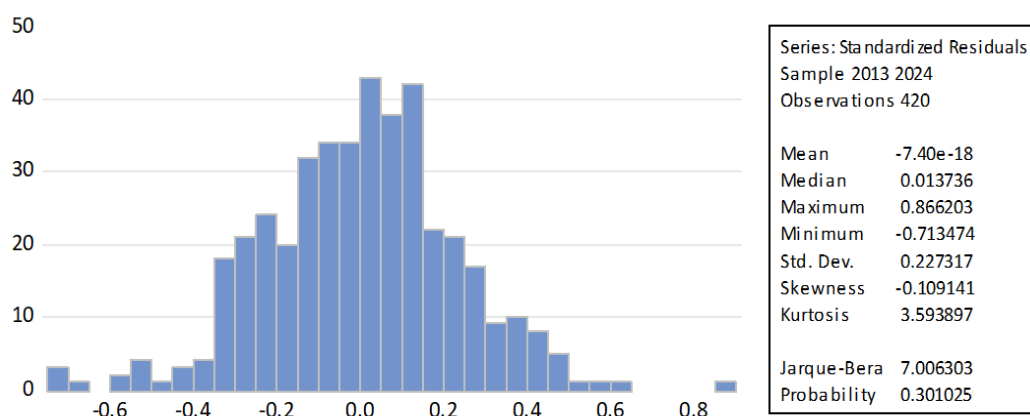
Dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan regresi data panel, pemenuhan asumsi klasik merupakan langkah penting guna memastikan keakuratan, validitas, dan reliabilitas dari model yang diestimasi. Asumsi-asumsi klasik tersebut meliputi normalitas residual, tidak adanya multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Apabila asumsi-asumsi ini terpenuhi, maka hasil estimasi akan bersifat *BLUE* (*Best Linear Unbiased Estimator*), sebagaimana ditegaskan oleh Ghazali (2018). Oleh karena itu, sebelum menarik kesimpulan dari hasil regresi, peneliti wajib

terlebih dahulu melakukan pengujian asumsi-asumsi klasik terhadap data yang digunakan.

1. Uji Normalitas

Dilakukan uji normalitas untuk memastikan bahwa data residual terdistribusi normal. Pengujian ini dilakukan menggunakan statistik Jarque-Bera melalui aplikasi *EViews*. Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas Jarque-Bera yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Kondisi ini penting karena distribusi residual yang normal akan menghasilkan estimasi parameter yang lebih valid dalam mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kesesuaian ini juga memperkuat validitas inferensi statistik yang dilakukan dalam pengujian hipotesis.

Hasil uji normalitas dalam penelitian dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat korelasi tinggi antar variabel independen yang dapat menyebabkan distorsi terhadap hasil estimasi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* untuk masing-masing variabel independen. Dalam penelitian ini, seluruh nilai *VIF* berada di bawah angka 10, yang berarti tidak terdapat indikasi multikolinearitas antar variabel. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi tidak adanya hubungan linear yang kuat antar variabel independen, sehingga hasil estimasi dapat diinterpretasikan secara tepat.

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.128682	17.13957	NA
X1	5.22E-14	8.577467	1.347545
X2	3.45E-14	14.34891	1.087351
X3	0.001861	3.595108	1.571707
X4	3.64E-15	1.485831	1.236556

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2025, *EViews 13*

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian terhadap asumsi homoskedastisitas dilakukan melalui uji heteroskedastisitas Breusch-Pagan. Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas *Chi-Square* sebesar 0,9572, jauh di atas tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual adalah konstan atau

homogen, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model. Kondisi ini penting karena adanya heteroskedastisitas dapat menyebabkan varians dari estimasi parameter tidak efisien, sehingga kesimpulan yang ditarik dari uji signifikansi menjadi tidak dapat diandalkan.

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.161128	Prob. F(4,415)	0.9579
Obs*R-squared	0.651267	Prob. Chi-Square(4)	0.9572
Scaled explained SS	0.641091	Prob. Chi-Square(4)	0.9584

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2025, *EViews 13*

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai probabilitas *Chi-Square* sebesar 0,9572 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi digunakan untuk memastikan tidak adanya korelasi antar residual dari periode yang berbeda dalam data *time series*. Dalam konteks data panel, autokorelasi dapat terjadi apabila kesalahan model bersifat sistematis dari waktu ke waktu.

Hasil uji autokorelasi dalam penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	158.8242	Prob. F(2,413)	0.2586
Obs*R-squared	182.5944	Prob. Chi-Square(2)	0.1581

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2025, *EViews 13*

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji autokorelasi di atas, menunjukkan bahwa hasil uji *Durbin-Watson* serta uji *Breusch-Godfrey*, nilai probabilitas untuk uji *F-statistic* dan *Obs*R-squared* masing-masing sebesar 0,2586 dan 0,1581, yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, tidak terdapat autokorelasi dalam model, dan model regresi dapat dinyatakan bebas dari pelanggaran asumsi ini.

Secara keseluruhan, keempat uji asumsi klasik yang dilakukan menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria statistik yang diperlukan untuk menghasilkan estimasi parameter yang valid, konsisten, dan tidak bias. Dengan demikian, peneliti dapat melanjutkan analisis regresi dan interpretasi hasil secara akademis tanpa perlu mengkhawatirkan adanya distorsi akibat pelanggaran asumsi dasar dalam analisis regresi data panel.

4.2.4. Uji Signifikansi t (Uji t)

Setelah dilakukan pemilihan model estimasi yang tepat, yaitu: *Fixed Effect Model (FEM)*, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk melihat seberapa besar perubahan pada variabel independen mempengaruhi perubahan pada variabel dependen, serta signifikansi pengaruh tersebut. Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah penduduk (X_1), upah minimum regional (X_2), tingkat pertumbuhan

ekonomi (X3), dan investasi (X4), sedangkan variabel dependennya adalah tingkat pengangguran terbuka (Y).

Hasil uji signifikansi t (uji t) dalam penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikansi t (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-14.98088	5.748024	-2.606267	0.0095
X1	1.235230	0.422335	2.924762	0.0037
X2	-2.06E-07	4.90E-08	-4.198148	0.0000
X3	-0.002000	0.415941	-0.004809	0.0096
X4	8.85E-09	8.72E-09	1.015441	0.3105

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2025, *EViews 13*

Model regresi data panel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = -14,98088 + 1,235230 X1 - 2,06E-07 X2 - 0,002000 X3 + 8,85E-09 X4 + e$$

Berdasarkan model regresi di atas, diketahui bahwa variabel jumlah penduduk (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 1,235 dan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,0037, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Artinya, setiap peningkatan jumlah penduduk, ceteris paribus, cenderung meningkatkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah penduduk tidak selalu diikuti oleh peningkatan lapangan kerja yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara angkatan kerja dan ketersediaan pekerjaan.

Variabel upah minimum regional (X2) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Koefisien regresi sebesar $-2,06E-07$ dengan nilai probabilitas 0,0000 mengindikasikan bahwa peningkatan upah minimum cenderung menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Temuan ini mendukung teori efisiensi tenaga kerja, di mana kenaikan upah minimum mampu meningkatkan daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah yang menyerap tenaga kerja. Selain itu, kebijakan upah yang sesuai dapat menciptakan iklim kerja yang produktif, yang pada gilirannya menurunkan angka pengangguran.

Variabel tingkat pertumbuhan ekonomi (X3) memiliki koefisien regresi negatif sebesar $-0,002$ dengan nilai probabilitas sebesar 0,0096. Meskipun nilai koefisiennya relatif kecil, tetapi secara statistik signifikan, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka. Hasil ini sejalan dengan teori makroekonomi yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan menstimulasi permintaan terhadap tenaga kerja. Namun demikian, kecilnya nilai koefisien menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak terlalu kuat, sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut bagaimana kualitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi tersebut dalam menciptakan peluang kerja.

Adapun variabel investasi (X4) menunjukkan koefisien positif sebesar $8,85E-09$, namun tidak signifikan secara statistik karena memiliki nilai probabilitas sebesar $0,3105 (> 0,05)$. Hal ini menunjukkan bahwa secara empiris, fluktuasi nilai investasi belum memberikan pengaruh nyata terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah selama periode pengamatan. Kondisi ini dapat terjadi karena realisasi investasi tidak seluruhnya berorientasi pada sektor padat karya atau disebabkan oleh adanya keterbatasan penyerapan tenaga kerja lokal akibat rendahnya keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Secara keseluruhan, hasil regresi ini memberikan gambaran bahwa kebijakan pembangunan ketenagakerjaan di Jawa Tengah perlu mempertimbangkan tidak hanya pertumbuhan penduduk dan kebijakan upah minimum, tetapi juga bagaimana meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi yang inklusif dan berdaya serap tinggi terhadap tenaga kerja. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mengurangi pengangguran secara berkelanjutan.

4.2.5. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan atau yang dikenal sebagai Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh

signifikan terhadap variabel dependen. Dalam konteks penelitian ini, Uji F bertujuan untuk menguji apakah jumlah penduduk, upah minimum regional, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan investasi secara kolektif memengaruhi tingkat pengangguran terbuka.

Adapun hasil uji signifikansi simultan (uji F) dalam penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

R-squared	0.600729	Mean dependent var	1.592085
Adjusted R-squared	0.560906	S.D. dependent var	0.359748
S.E. of regression	0.238384	Akaike info criterion	0.058392
Sum squared resid	21.65109	Schwarz criterion	0.433559
Log likelihood	26.73764	Hannan-Quinn criter.	0.206675
F-statistic	15.08522	Durbin-Watson stat	1.616869
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2025, *EViews 13*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *F-statistic* sebesar 15,08522 dengan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,000000. Nilai ini jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, secara simultan, keempat variabel independen yang digunakan dalam model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Dengan kata lain, model regresi yang dibangun memiliki validitas yang kuat secara statistik untuk menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen.

Temuan ini menunjukkan bahwa dinamika pengangguran terbuka tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks dari berbagai aspek ekonomi, sosial, dan kebijakan, seperti pertumbuhan jumlah penduduk, kebijakan pengupahan, kinerja ekonomi daerah, serta investasi yang masuk. Oleh karena itu,

penanganan isu pengangguran memerlukan pendekatan multisektor dan lintas variabel yang saling mendukung dalam implementasinya.

4.2.6. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau R-squared (R^2) merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi dari seluruh variabel independen yang terdapat dalam model. R^2 adalah indikator penting untuk menilai seberapa baik model regresi dalam memprediksi atau menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen.

Adapun hasil uji koefisien determinasi atau R-squared (R^2) dalam penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.600729	Mean dependent var	1.592085
Adjusted R-squared	0.560906	S.D. dependent var	0.359748
S.E. of regression	0.238384	Akaike info criterion	0.058392
Sum squared resid	21.65109	Schwarz criterion	0.433559
Log likelihood	26.73764	Hannan-Quinn criter.	0.206675
F-statistic	15.08522	Durbin-Watson stat	1.616869
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2025, *EViews 13*

Dalam penelitian ini, nilai *Adjusted R-squared* yang diperoleh sebesar 0,560906 menunjukkan bahwa sekitar 56,09% variasi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013–2024 dapat dijelaskan oleh variabel jumlah penduduk, upah minimum regional, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan investasi. Sementara itu, sisanya sebesar 43,91% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model regresi.

Nilai *adjusted R²* yang berada di atas 50% menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen tergolong cukup kuat. Meski demikian, masih terdapat porsi variasi yang cukup besar yang belum dijelaskan, yang mengindikasikan perlunya memperluas cakupan variabel dalam penelitian selanjutnya. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, keterampilan tenaga kerja, kebijakan ketenagakerjaan, mobilitas tenaga kerja, dan perkembangan sektor informal berpotensi turut memengaruhi tingkat pengangguran terbuka dan dapat menjadi fokus dalam studi lanjutan.

Dengan demikian, koefisien determinasi dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa model regresi yang dibangun telah mampu menjelaskan lebih dari separuh dinamika pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah secara statistik. Namun, upaya penguatan kebijakan penurunan pengangguran tetap memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek lain yang saling terintegrasi.

4.3. Pembahasan

Pembahasan dalam subbab ini diarahkan untuk mengkaji lebih dalam hubungan antara variabel independen yang diteliti terhadap variabel dependen, yaitu tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercermin dari hasil analisis regresi data panel yang telah dilakukan sebagai berikut:

4.3.1. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. Temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Hal ini sejalan dengan pandangan Todaro dan Smith (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat menjadi tantangan serius bagi negara berkembang dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang produktif.

Dalam konteks lokal, penelitian Daryanto dan Hafiz (2020) yang dilakukan di beberapa provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika tidak diiringi peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing tenaga kerja. Di Jawa Tengah, pertumbuhan penduduk yang cenderung tinggi di wilayah-wilayah urban seperti: Kota Semarang, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Brebes menambah tekanan terhadap pasar kerja formal yang kapasitasnya terbatas. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan produktivitas tenaga kerja secara simultan.

4.3.2. Pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Upah Minimum Regional (UMR) dalam penelitian ini terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran

terbuka. Temuan ini konsisten dengan teori ekonomi Keynesian yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat melalui kebijakan pengupahan akan meningkatkan konsumsi dan permintaan barang/jasa, yang pada gilirannya akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja (Mankiw, 2018).

Penelitian oleh Wulandari dan Santoso (2021) di Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan menunjukkan bahwa UMR yang tepat dapat memberikan dorongan terhadap daya beli masyarakat tanpa harus menyebabkan pengurangan tenaga kerja oleh perusahaan. Di Jawa Tengah, UMR yang kompetitif di beberapa wilayah seperti Kota Semarang dan Kabupaten Kudus telah terbukti menarik investasi padat karya dan mendukung pengurangan pengangguran terbuka. Meski demikian, implementasi UMR harus tetap memperhatikan kondisi sektor usaha mikro dan kecil agar kebijakan tersebut tidak berdampak kontraproduktif.

4.3.3. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Penelitian ini juga membuktikan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini mengonfirmasi teori Okun (*Okun's Law*) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Namun, nilai koefisien yang kecil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jawa Tengah belum sepenuhnya inklusif atau bersifat *pro-job*.

Hasil ini diperkuat oleh studi oleh Kurniawan dan Rahmanto (2022) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah Indonesia lebih banyak ditopang oleh sektor-sektor padat modal dan jasa, yang tidak terlalu intensif dalam penggunaan tenaga kerja. Oleh karena itu, untuk menurunkan pengangguran secara signifikan, pemerintah daerah perlu mengarahkan pertumbuhan ekonomi ke sektor padat karya seperti manufaktur berbasis UMKM, pertanian terpadu, dan sektor pariwisata yang memiliki efek pengganda besar terhadap penciptaan lapangan kerja.

4.3.4. Pengaruh Investasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berbeda dengan tiga variabel sebelumnya, variabel investasi dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini mungkin disebabkan oleh sifat investasi yang tidak langsung menciptakan lapangan kerja dalam jangka pendek, atau karena jenis investasi yang masuk bersifat padat modal dan berbasis teknologi tinggi. Dalam banyak kasus, investasi yang besar tidak selalu menghasilkan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, terutama jika tidak selaras dengan ketersediaan tenaga kerja terampil. Investasi yang dilakukan harus mempertimbangkan potensi dan kebutuhan tenaga kerja lokal agar dapat memberikan dampak positif yang optimal terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penelitian dari Setiawan dan Hapsari (2021) yang dimuat dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah menyimpulkan bahwa investasi di sektor sekunder dan tersier seringkali tidak memberikan dampak signifikan

terhadap pengangguran jika tidak didukung oleh reformasi struktural, peningkatan keterampilan kerja, dan efisiensi birokrasi. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan baru dalam kebijakan investasi, yaitu mendorong investasi yang berorientasi pada padat karya, termasuk di sektor ekonomi kreatif, agribisnis modern, serta industri pariwisata berbasis lokal.

4.3.5. Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Regional, Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi secara Simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa keempat variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mencerminkan bahwa pengangguran merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor tunggal. Kompleksitas permasalahan pengangguran terbuka memerlukan pendekatan lintas sektor dan kolaborasi antara berbagai institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

Affiah dan Suryani (2023), mengemukakan bahwa penyelesaian masalah pengangguran di daerah tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi makro, tetapi juga pada aspek sosial, pendidikan, dan kelembagaan lokal. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merumuskan strategi yang komprehensif untuk mengatasi masalah pengangguran di daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab IV mengenai pengaruh jumlah penduduk, upah minimum regional, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan investasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013–2024, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin besar pula potensi peningkatan angka pengangguran terbuka, terutama jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dan penyediaan kesempatan kerja menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika pasar tenaga kerja di daerah tersebut.
2. Upah minimum regional (UMR) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Artinya, peningkatan UMR cenderung diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka. Temuan ini mencerminkan bahwa kebijakan pengupahan yang layak mampu meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong konsumsi

domestik, dan secara tidak langsung menstimulasi kegiatan ekonomi yang membuka peluang kerja baru. Selain itu, UMR yang kompetitif dapat menjadi insentif bagi perusahaan untuk memperluas operasi bisnis dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

3. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Meskipun nilai koefisiennya kecil, secara statistik pertumbuhan ekonomi memiliki kontribusi terhadap penurunan pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ekonomi daerah tumbuh, permintaan terhadap tenaga kerja meningkat, meskipun dampaknya mungkin belum merata atau belum cukup kuat untuk menyerap seluruh angkatan kerja baru secara optimal.
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun investasi di Provinsi Jawa Tengah meningkat selama periode pengamatan, dampaknya terhadap penurunan pengangguran belum terlihat secara nyata. Fenomena ini kemungkinan terjadi karena investasi yang masuk lebih banyak dialokasikan pada sektor-sektor yang bersifat padat modal dan kurang menyerap tenaga kerja lokal, atau karena adanya mismatch antara jenis pekerjaan yang tersedia dengan keterampilan tenaga kerja.
5. Secara simultan, keempat variabel independen dalam model, yaitu jumlah penduduk, upah minimum regional, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan investasi, berpengaruh signifikan terhadap tingkat

pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji F yang signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dinamika pengangguran terbuka tidak hanya ditentukan oleh satu variabel tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks dari berbagai faktor ekonomi dan kebijakan yang saling terkait.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, pemangku kebijakan, dan pihak-pihak terkait dalam upaya mengatasi pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah:

1. Pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam merumuskan program pengendalian pertumbuhan penduduk melalui edukasi keluarga berencana dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keseimbangan antara jumlah anggota keluarga dan ketersediaan sumber daya ekonomi. Selain itu, perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan kapasitas daerah dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif.
2. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebaiknya terus menyesuaikan kebijakan upah minimum yang berbasis pada kebutuhan hidup layak, produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Upah minimum yang

adil tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga dapat mendorong daya saing tenaga kerja dan pertumbuhan usaha.

3. Pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja secara luas, seperti sektor industri pengolahan, pertanian modern, dan pariwisata berbasis masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dan kemudahan berusaha juga penting untuk mendukung iklim investasi dan aktivitas ekonomi produktif.
4. Pemerintah daerah perlu mendorong masuknya investasi yang bersifat padat karya dan memberikan insentif kepada investor yang menyerap tenaga kerja lokal. Di sisi lain, peningkatan keterampilan dan kompetensi angkatan kerja melalui pelatihan vokasional dan sertifikasi perlu terus diperkuat agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Graha Ilmu.
- Alfalih, A. A. (2024). The Impact of Oil Prices, Foreign Direct Investment and Trade Openness on Unemployment Rates in an Oil-Exporting Country: The Case of Saudi Arabia. *Heliyon*, 10(3), e25094. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25094>
- Anggrain, R. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota Padang. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 159–169.
- Aprilya, I., & Juliprijanto, W. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, UMR, dan TPT Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(5), 469–482. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika>
- Ardian, R., Syahputra, M., & Dermawan, D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *EBISMEN: Jurnl Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(3), 190–198.
- Aswanto. (2021). Pengaruh Pendidikan, Jumlah Penduduk dan UMR Terhadap Jumlah Pengangguran di Provinsi Riau 2010-2020. *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*, 01(1), 55–65.
- Aswanto, A. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk dan UMR terhadap Jumlah Pengangguran di Provinsi Riau 2010-2020. *Jurnal Ikraith-Ekonomika*, 2(5), 87–95.
- Benggolo, A. (2000). *Tenaga Kerja dan Pembangunan*. Yayasan Jasa Karya.
- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 1–12.
- Dewi, R. F., & Setyowati, E. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Upah dan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan di Eks-Karesidenan Pati Tahun 2017-2021. *Procedia of Social Sciences and Humanities Proceedings of the 1st SENARA*. <https://pssh.umsida.ac.id>.
- Dewi, S. (2017). Pengangguran Terbuka: Kasus di Indonesia. *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1).

- Diyanthi, M. (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah/UMR, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Enam Kota SBH Jawa Tengah Tahun 2014-2020. *Jurnal Ekonomi UII*, 8(1).
- Gani, K. A. (2022). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ekonomi Universitas Teuku Umar*, 2(5).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Greogry, M. N. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro (III)*. Salemba Empat.
- Hadi, A. S., Riani, W., & Haryatiningsih, R. (2022). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (LPM) dan Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2016-2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(2), 446–454. <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.4470>
- Hendaryanto, M. N. (2018). Faktor Determinan Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah (2010-2016). *Jurnal Ekonomi UII*, 5(1).
- Horvath, J., & Yang, G. (2022). Unemployment Dynamics and Informality in Small Open Economies. *European Economic Review*, 141, 103949. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2021.103949>
- [https://jateng.bps.go.id.\(n.d.\)](https://jateng.bps.go.id.(n.d.)).
- [https://www.bps.go.id/\(n.d.\)](https://www.bps.go.id/(n.d.)).
- Kasanah, Y. T., Hanim, A., & Suswandi, P. E. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2014. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 21.
- Marliana, L. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 87. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.490>
- Mohini, S. S. (2022). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2019-2021. *Jurnal Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 5(10).
- Muana, N. (2001). *Makroekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan*. PT Raja Grafindo Persada.

- Murniati. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Regional terhadap Tingkat Pengangguran melalui Jumlah Investasi di Kabupaten Malang. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(2), 189–202. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1900>
- Muslim, M. R. (2014). Pengangguran Terbuka dan Determinannya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 171–181.
- Putera, A. M. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Gerbangkertosusila. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 92–101.
- Putra, I. K. Y. D. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan UMR Terhadap Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 7(11), 2461–2489.
- Rahardja, P. (2006). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikroekonomi dan Makroekonomi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahmawati, N., Prasetyanto, P. K., & Islami, F. S. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR), dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia). *Convergence: The Journal of Economic Development*, 4(1), 19–31.
- Sabihi, D. M., Kumenaung, A. G., & Niode, A. O. (2021). Pengaruh upah minimum provinsi, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(1).
- Sahara, W. A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Inflasi dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1).
- Saputri, A. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Provinsi Lampung). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2(2).
- Siregar, T. H., & Lubis, F. A. (2023). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Regional (UMR) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Sumatera Utara. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1290–1303.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Suhadi, F. R., & Setyowati, E. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekobis Review*, 10(2), 879–888.
- Todaro, M. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi: Vol. Jilid 1* (9th ed.). Erlangga.
- Tumilaar, T. V., Maramis, M. Th. B., & Siwu, H. F. Dj. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 61–72.
- Wati, I. M., Utami, A. F., & Nisa, F. L. (2024). Pengaruh Angkatan Kerja dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 499–513.
- Yuliana, R. H. (2019). Analisis Upah Minimum Regional (UMR) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Aceh Tahun 1984-2018. *SEMDI UNAYA*, 01(1), 475–488. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/semdiunaya>
- Yuni, R., & Elviera, C. D. (2020). Pengaruh UMR, Kurs dan Penduduk Jiwa Terhadap Tingkat Pengangguran Sumatera Utara Periode 2001-2017. *NIAGAWAN*, 9(1), 73–78.



Lampiran 1. Tabulasi Data Penelitian

Tabulasi Data Penelitian

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	X1	X2	X3	X4	Y
1	3301 Kabupaten Cilacap	2013	1676089	887667	10,46	0	6,68
		2014	1685573	1016667	10,02	0	5,65
		2015	1703390	1195667	9,83	0	8,01
		2016	1711627	1527000	9,11	12162084,7	7,29
		2017	1719504	1693689	8,87	395274,4	6,3
		2018	1727098	1841209	8,65	4805118,2	7,49
		2019	1944857	1989058,08	8,39	6830889,7	7,24
		2020	1963824	2158327	7,76	4285260,1	9,1
		2021	1988622	2228904	7,72	1554233,1	9,97
		2022	2007800	2230731	7,76	622736,6	9,62
		2023	2027400	2383090	7,81	1730249,3	8,74
		2024	2046392	2640248	7,49	1260287,3	7,83
2	3302 Kabupaten Banyumas	2013	1605579	877500	3,79	127320,1	5,45
		2014	1620918	1000000	3,8	2828820,6	5,37
		2015	1650630	1100000	3,86	103696	6,37
		2016	1665025	1350000	3,87	119899,6	5,11
		2017	1679124	1461400	3,89	441641,7	4,62
		2018	1693006	1589000	3,94	614635,3	4,15
		2019	1776918	1750000	3,96	461612,5	4,17
		2020	1789630	1900000	3,99	1075029,7	6
		2021	1806013	1970000	4,01	996393,8	6,05
		2022	1828600	1983261	4,03	859956	6,05
		2023	1847100	2118124	4,05	1094383,7	6,35
		2024	1865270	2338410	4,08	1198620,3	6,18
3	3303 Kabupaten Purbalingga	2013	879880	896005	1,79	0,1	5,63
		2014	889214	1023000	1,81	4454,4	5,13
		2015	907510	1101600	1,83	175879,1	4,84
		2016	916427	1377500	1,84	19781,7	5,02
		2017	925193	1522500	1,83	45765,3	5,33
		2018	933989	1655200	1,83	9103,8	6,02
		2019	998561	1788500	1,83	52876,3	4,73
		2020	1007794	1940800	1,86	137433,3	6,1
		2021	1019840	1988000	1,86	569164	6,05
		2022	1027300	1996814	1,85	264394,4	5,23
		2023	1037600	2130981	1,84	158431,9	5,61

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	X1	X2	X3	X4	Y
		2024	1047755	2338283,12	1,84	165417,3	4,96
4	3304 Kabupaten Banjarnegara	2013	889921	835000	1,54	421687,8	4,16
		2014	895986	920000	1,56	676803,3	4,06
		2015	907410	1112500	1,58	0	5,05
		2016	912917	1265000	1,58	20224,9	3,69
		2017	918219	1370000	1,58	50645,3	4,72
		2018	923192	1490000	1,58	148609,1	3,99
		2019	1017767	1610000	1,59	168026,9	4,44
		2020	1026866	1748000	1,61	68582,9	5,86
		2021	1038718	1805000	1,61	114381,1	5,86
		2022	1047200	1819835	1,6	492561,1	6,38
		2023	1057600	1958170	1,6	498759,3	6,26
		2024	1067606	2170475,32	1,61	309271,2	5,57
5	3305 Kabupaten Kebumen	2013	1176722	835000	2	6353,2	3,52
		2014	1181006	975000	2,03	0	3,25
		2015	1188600	1157500	2,07	499509,5	4,14
		2016	1192007	1324600	2,06	41408,9	3,58
		2017	1195092	1433900	2,05	17065	5,58
		2018	1197982	1560000	2,05	71422,6	5,48
		2019	1350438	1686000	2,05	78430,3	4,69
		2020	1361913	1835000	2,08	39135,2	6,07
		2021	1376825	1895000	2,08	106714,6	6,03
		2022	1397600	1906781	2,09	135572,3	5,92
		2023	1414800	2035890	2,11	257838,2	5,11
		2024	1431777	2259873,55	2,13	229839,1	5,07
6	3306 Kabupaten Purworejo	2013	705483	849000	1,39	6218,2	5,15
		2014	708038	910000	1,38	2576,5	5,1
		2015	712690	1165000	1,38	12734,2	4,01
		2016	714574	1300000	1,38	0	3,2
		2017	716477	1445000	1,38	13941,7	3,64
		2018	718316	1573000	1,37	113205	4,43
		2019	769880	1700000	1,37	18337,1	2,91
		2020	773588	1845000	1,38	72488,9	4,04
		2021	778257	1905400	1,38	44815,3	3,59
		2022	788300	1911850	1,37	67572	4,45
		2023	795000	2043902	1,37	138975,3	4,02
		2024	801670	2265937,67	1,37	125609,5	3,89
7	3307 Kabupaten Wonosobo	2013	769318	880000	1,42	7398661,3	5,82
		2014	773280	990000	1,42	6385748	5,34
		2015	780790	1166000	1,41	4133544,2	4,47

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	X1	X2	X3	X4	Y
		2016	784207	1326000	1,41	0	5,21
		2017	787384	1457100	1,39	1688,5	4,18
		2018	790504	1585000	1,38	16125,3	3,5
		2019	879124	1712500	1,38	14715	3,43
		2020	886613	1859000	1,4	9280,4	5,37
		2021	896346	1920000	1,4	226642,1	5,26
		2022	909700	1931285	1,38	92517,5	5,01
		2023	920500	2076209	1,38	257592,1	4,95
		2024	931142	2299521,38	1,38	150178,4	4,02
8	3308 Kabupaten Magelang	2013	1221681	942000	2,37	72936,6	6,13
		2014	1233695	1152000	2,39	589224,8	7,45
		2015	1257120	1255000	2,4	521461,3	5,16
		2016	1268396	1410000	2,41	30638,4	4,38
		2017	1279625	1570000	2,4	185031,7	2,44
		2018	1290591	1742000	2,39	125480,3	2,89
		2019	1299859	1882000	2,39	193883,8	3,07
		2020	1305512	2042200	2,41	197252,5	4,27
		2021	1312573	2075000	2,4	309145	5,03
		2022	1330700	2081807	2,4	892603,6	4,97
		2023	1341500	2236777	2,4	1124873,5	4,42
		2024	1351952	2467488	2,41	487115,5	3,55
9	3309 Kabupaten Boyolali	2013	951817	895000	2,27	76069,9	5,44
		2014	957857	1116000	2,3	18491	4,95
		2015	969330	1197800	2,34	2423350	2,03
		2016	974579	1403500	2,37	1024111,6	4,43
		2017	979799	1519289	2,38	474463,2	3,67
		2018	984807	1651650	2,39	1113601,2	2,18
		2019	1062713	1790000	2,4	422073,6	3,09
		2020	1070247	1942500	2,43	709545	5,28
		2021	1079952	2000000	2,46	1047750,5	5,09
		2022	1090100	2010299	2,49	1518219,5	4,92
		2023	1099900	2155712	2,52	934627,8	4,05
		2024	1109332	2396598	2,53	1368470,8	3,16
10	3310 Kabupaten Klaten	2013	1148994	871500	2,82	0	5,34
		2014	1154040	1026600	2,86	33630,3	4,75
		2015	1163220	1170000	2,88	41588	2,51
		2016	1167401	1400000	2,91	62385,3	3,7
		2017	1171411	1528500	2,92	247327,2	4,35
		2018	1174986	1661632,35	2,92	229788,5	3,14
		2019	1260506	1795061,43	2,92	212273,4	3,54

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	X1	X2	X3	X4	Y
		2020	1267272	1947821,16	2,97	43751,7	5,46
		2021	1275850	2011515	2,97	110407,8	5,48
		2022	1284400	2015623	2,99	1081215,8	4,31
		2023	1292800	2152323	3,02	2897471,3	4,2
		2024	1300940	2389872,78	3,04	2977284,7	3,97
11	3311 Kabupaten Sukoharjo	2013	849506	902000	2,67	407750,6	5,98
		2014	856937	1150000	2,66	83683,5	4,6
		2015	871400	1223000	2,65	420554	4,52
		2016	878374	1396000	2,68	234782,2	6,1
		2017	885205	1513000	2,7	2055377,8	2,27
		2018	891912	1648000	2,7	1107151,3	2,72
		2019	907587	1783500	2,72	921677,9	3,39
		2020	911603	1938000	2,74	439117,3	6,93
		2021	916627	1986450	2,74	861519,3	3,32
		2022	932700	1998153	2,74	1670938,1	2,47
		2023	941700	2138248	2,74	1188105,6	3,4
		2024	950424	2359488	2,75	656350,8	3,65
12	3312 Kabupaten Wonogiri	2013	942377	830000	2,13	0	3,61
		2014	945817	954000	2,14	0	3,45
		2015	951980	1101000	2,15	84127,5	3,07
		2016	954706	1293000	2,15	222707,4	3,46
		2017	957106	1401000	2,14	41831,9	2,38
		2018	959492	1542000	2,14	42569,2	2,28
		2019	1043177	1655000	2,13	58524,9	2,55
		2020	1049292	1797000	2,17	41716,5	4,27
		2021	1057087	1827000	2,15	341596,2	2,43
		2022	1051100	1839043	2,16	207345,8	1,95
		2023	1054200	1968448	2,18	95052,5	1,92
		2024	1057045	2180587,5	2,19	106654,5	2,4
13	3313 Kabupaten Karanganyar	2013	840171	896500	2,69	0	3,84
		2014	848255	1060000	2,68	0	3,54
		2015	864020	1226000	2,67	0	3,6
		2016	871596	1420000	2,68	1875248,6	5,82
		2017	879078	1560000	2,69	1957677,3	3,17
		2018	886519	1696000	2,71	989035,4	2,28
		2019	931963	1833000	2,72	261021,8	3,12
		2020	938808	1989000	2,75	181965,3	5,96
		2021	947642	2054040	2,76	936568,3	5,89
		2022	955100	2064313	2,76	898890,9	5,7
		2023	961900	2207484	2,78	1233014,1	4,35

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	X1	X2	X3	X4	Y
		2024	968484	2437110	2,83	1392029,8	3,47
14	3314 Kabupaten Sragen	2013	871989	864000	2,64	25	5,63
		2014	875600	960000	2,68	5744,1	6,04
		2015	882090	1105000	2,72	20598,4	4,51
		2016	885122	1300000	2,74	965145,6	5,88
		2017	887889	1422585,52	2,77	999424,6	4,55
		2018	890518	1546492,72	2,77	2441479	4,83
		2019	976951	1673500	2,78	33837,4	3,32
		2020	983641	1815914,85	2,81	117734,8	4,75
		2021	992243	1829500	2,82	617771,9	4,76
		2022	997500	1839429	2,84	773266,5	4,69
		2023	1004800	1969569	2,86	468007	3,87
		2024	1011824	2182200	2,89	466013,3	3,53
15	3315 Kabupaten Grobogan	2013	1336304	842000	2,01	75007,3	6,1
		2014	1343960	935000	1,98	806757,5	4,25
		2015	1358400	1160000	2,01	1265491,9	5,22
		2016	1365207	1305000	2	28717	4,2
		2017	1371610	1435000	2	247327,2	3,02
		2018	1377788	1560000	2	215708,8	2,22
		2019	1453526	1685500	2	393135,8	3,54
		2020	1460873	1830000	2,03	3492706,6	4,5
		2021	1470150	1890000	2,03	4137736	4,38
		2022	1492900	1894032	2,04	517607,1	4,4
		2023	1506400	2029569	2,05	344602,3	4,02
		2024	1519382	2254090	2,07	933731,2	3,23
16	3316 Kabupaten Blora	2013	844444	932000	1,64	46500	6,23
		2014	848369	1009000	1,64	47356,5	4,3
		2015	855570	1180000	1,63	0	4,68
		2016	858865	1328500	1,84	0	4,75
		2017	862110	1438100	1,87	100356	2,85
		2018	865013	1564000	1,94	13246,2	3,3
		2019	884333	1690000	1,91	2561,8	3,82
		2020	886147	1834000	1,78	282232,4	4,89
		2021	888224	1894000	1,89	75106,9	3,81
		2022	901600	1904196	1,98	74495,7	3,7
		2023	908000	2040080	1,87	120665,1	3,1
		2024	914172	2238430,85	1,83	759652,4	3,67
17	3317 Kabupaten Rembang	2013	608903	896000	1,38	17279,1	5,97
		2014	614087	985000	1,4	73039,7	5,23
		2015	624100	1120000	1,38	47128	4,51

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	X1	X2	X3	X4	Y
		2016	628922	1300000	1,37	1550501	5,75
		2017	633584	1408000	1,39	74039	3,19
		2018	638188	1535000	1,4	427814,8	2,83
		2019	645333	1660000	1,39	242943,5	3,6
		2020	647766	1802000	1,41	237572,5	4,83
		2021	650770	1861000	1,41	154593,7	3,67
		2022	660200	1874322	1,42	765401,9	1,76
		2023	665200	2015927	1,42	261466,6	2,6
		2024	670095	2236168,78	1,42	535163,6	2,84
18	3318 Kabupaten Pati	2013	1218016	927600	3,14	0	7,29
		2014	1225594	1013027	3,1	37970,4	6,37
		2015	1239990	1176500	3,11	138193,9	4,43
		2016	1246691	1310000	3,12	1254316,9	11,98
		2017	1253299	1420500	3,14	889755,5	3,83
		2018	1259590	1585000	3,15	106167,7	3,57
		2019	1324188	1742000	3,16	221462,4	3,64
		2020	1330983	1891000	3,21	176431,6	4,74
		2021	1339572	1953000	3,21	222494,1	4,6
		2022	1359400	1968339	3,22	188886,3	4,45
		2023	1370800	2107697	3,23	372694,6	4,29
		2024	1381912	2332350	3,25	381737	3,87
19	3319 Kabupaten Kudus	2013	810810	990000	8,5	0	8,07
		2014	821136	1150000	8,58	0	5,03
		2015	841500	1380000	8,36	0	5,04
		2016	851478	1608200	8,29	881543,3	5,89
		2017	861430	1740900	8,29	1034981,2	3,56
		2018	871311	1892500	8,21	687187,7	3,28
		2019	849184	2044467,75	8,13	2041677,3	3,8
		2020	852443	2218451,95	8,14	1919450,4	5,53
		2021	856472	2290995	7,65	720573,1	3,77
		2022	874600	2293058	7,34	583677	3,21
		2023	883300	2439814	7,15	1540216,4	3,25
		2024	891721	2680485,72	7,08	1012526,8	3,19
20	3320 Kabupaten Jepara	2013	1153213	875000	2,18	0	6,34
		2014	1170797	1000000	2,19	0	5,09
		2015	1205800	1150000	2,2	4293	3,12
		2016	1223198	1350000	2,2	21992,3	4,29
		2017	1240600	1600000	2,2	56968	4,84
		2018	1257912	1739360	2,21	8365,1	3,75
		2019	1184947	1879031	2,22	17620,7	2,92

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	X1	X2	X3	X4	Y
		2020	1188510	2040000	2,24	34311,7	6,7
		2021	1192811	2107000	2,25	149830,7	4,23
		2022	1221100	2108403	2,25	160736,9	4,1
		2023	1232900	2272627	2,24	295572,2	3,35
		2024	1244314	2610224	2,23	421957,8	3,34
21	3321 Kabupaten Demak	2013	1094472	995000	1,91	0	7,08
		2014	1106328	1280000	1,89	0	5,17
		2015	1129300	1535000	1,92	0	6,02
		2016	1140675	1745000	1,93	1003806,8	8,4
		2017	1151796	1900000	1,93	758548,7	4,47
		2018	1162805	2065490	1,93	463882,8	7,03
		2019	1203956	2240000	1,92	517438,8	5,42
		2020	1212377	2432000	1,97	962320,9	7,31
		2021	1223217	2511526	1,95	2569159,4	5,28
		2022	1240500	2513005	1,94	2495472,8	6,11
		2023	1253000	2680421	1,95	2315260,5	5,38
		2024	1265053	2940716	1,95	891898,7	4,75
22	3322 Kabupaten Semarang	2013	974092	1051000	3,6	2612023,8	3,9
		2014	987557	1208200	3,61	99,4	4,38
		2015	1014200	1419000	3,62	2705247,5	2,57
		2016	1027489	1610000	3,64	222324,6	4,87
		2017	1040629	1745000	3,64	1339475,7	1,78
		2018	1053786	1900000	3,64	2141898,6	2,25
		2019	1053094	2055000	3,65	545448,3	2,54
		2020	1059844	2229880,5	3,64	575108,6	4,57
		2021	1068492	2302798	3,64	633558,7	5,02
		2022	1080700	2311254	3,63	1156629,6	4,81
		2023	1089800	2480988	3,61	1835056,4	4,05
		2024	1098572	2750136	3,61	1945587,9	3,73
23	3323 Kabupaten Temanggung	2013	731911	940000	1,58	23648	4,87
		2014	738915	1050000	1,59	174724,2	3,19
		2015	752490	1178000	1,6	1690728	1,5
		2016	759128	1313000	1,61	52096,5	3,39
		2017	765594	1431500	1,6	165803,8	2,97
		2018	772018	1557000	1,6	93391	3,23
		2019	790174	1682027,1	1,59	7581,9	2,98
		2020	794403	1825200	1,6	33142	3,85
		2021	799764	1885000	1,59	94001,4	2,62
		2022	808500	1887832	1,58	141770,7	2,54
		2023	814900	2027569	1,59	172781,2	2,32

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	X1	X2	X3	X4	Y
		2024	821118	2246850	1,59	123774,7	2,35
24	3324 Kabupaten Kendal	2013	926812	953100	3,06	14527,7	6,43
		2014	934643	1206000	3,07	697915,6	6,15
		2015	949680	1383450	3,08	76073,1	7,07
		2016	957024	1639600	3,11	0	6,31
		2017	964106	1774867	3,12	4566,1	4,93
		2018	971086	1929458	3,12	311708,4	6,02
		2019	1018505	2084393,48	3,13	135930,5	6,26
		2020	1025020	2261775	3,16	201109,1	7,56
		2021	1033367	2335735	3,18	560723	7,55
		2022	1052800	2340312	3,18	585891,4	7,34
		2023	1064800	2508300	3,2	1579250,1	5,76
		2024	1076483	2783455,25	3,24	2531124,7	5,01
25	3325 Kabupaten Batang	2013	729616	970000	1,56	194640,7	7,02
		2014	736397	1146000	1,57	347351,9	7,42
		2015	749720	1270000	1,58	478270,3	4,56
		2016	756079	1467500	1,59	0	5,88
		2017	762377	1603000	1,59	321422,8	5,82
		2018	768583	1749900	1,59	544148,6	4,2
		2019	801718	1900000	1,59	240595,5	4,11
		2020	807005	2061700	1,61	253422,5	6,92
		2021	813791	2129117	1,63	3202162	6,59
		2022	828900	2135535	1,63	1142111,1	6,64
		2023	838200	2282026	1,64	805075,6	6,06
		2024	847175	2534383	1,67	1278986,2	5,67
26	3326 Kabupaten Pekalongan	2013	861082	962000	1,66	6559,4	4,78
		2014	867573	1145000	1,66	0	6,03
		2015	880090	1271000	1,67	39750	5,1
		2016	886197	1463000	1,68	1373602,7	5,08
		2017	891892	1583697,5	1,68	5907349,9	4,39
		2018	897711	1721637,55	1,68	1241009,1	4,36
		2019	968821	1859885,05	1,68	40784,4	4,35
		2020	976504	2018161,27	1,69	76392,8	6,97
		2021	986455	2084155	1,69	478072,6	4,28
		2022	1007400	2094646	1,66	202730,7	3,23
		2023	1019000	2247346	1,66	655904,7	3,25
		2024	1030342	2486653,59	1,66	61426,2	3,3
27	3327 Kabupaten Pemalang	2013	1279596	908000	1,82	3462,2	6,48
		2014	1284236	1066000	1,82	0	7,44
		2015	1292610	1193400	1,84	0	6,53

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	X1	X2	X3	X4	Y
		2016	1296281	1325000	1,86	252734,1	4,85
		2017	1299724	1460000	1,87	2033,3	5,59
		2018	1302813	1588000	1,87	103357,8	6,17
		2019	1471489	1718000	1,87	51606,5	6,45
		2020	1484209	1865000	1,92	110094,8	7,64
		2021	1500754	1926000	1,93	175273,7	6,71
		2022	1523600	1940890	1,92	630479,4	6,63
		2023	1541700	2081783	1,91	488733,8	6,55
		2024	1559306	2296140	1,92	232594,3	6,63
28	3328 Kabupaten Tegal	2013	1415009	850000	2,51	0	6,89
		2014	1420132	1000000	2,52	7318,3	8,47
		2015	1429390	1155000	2,55	299335,5	9,52
		2016	1433515	1373000	2,58	93152,2	6,12
		2017	1437225	1487000	2,58	404467,7	7,33
		2018	1440698	1617000	2,59	59570,2	8,24
		2019	1596996	1747000	2,59	40784,4	8,12
		2020	1608611	1896000	2,62	7577239,2	9,82
		2021	1623595	1958000	2,63	157467,2	9,97
		2022	1654800	1968446	2,61	565738,4	9,64
		2023	1674800	2106238	2,62	525210	8,6
		2024	1694235	2333586,46	2,63	1257484,5	7,53
29	3329 Kabupaten Brebes	2013	1764648	859000	3,32	0	9,61
		2014	1773379	1000000	3,37	0	9,53
		2015	1788880	1166550	3,42	16262,5	6,49
		2016	1796004	1310000	3,45	0	8,22
		2017	1802829	1418100	3,41	62908,2	8,04
		2018	1809096	1542000	3,39	67550,8	7,2
		2019	1978759	1665850	3,39	44044,3	7,39
		2020	1992685	1807614	3,49	34026,1	9,83
		2021	2010617	1866723	3,45	514789,8	9,78
		2022	2043100	1885019	3,44	266600,2	9,48
		2023	2065500	2018837	3,39	751537	8,98
		2024	2087331	2239801,5	3,42	712797,5	8,35
30	3371 Kota Magelang	2013	119935	901500	0,65	0	6,75
		2014	120373	1037000	0,65	0	7,38
		2015	121110	1211000	0,64	0	6,43
		2016	121474	1341000	0,65	13740	8,99
		2017	121872	1453000	0,65	16418900	6,68
		2018	122111	1580000	0,65	12966,2	4,78
		2019	121526	1707000	0,65	25080,3	4,37

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	X1	X2	X3	X4	Y
		2020	121610	1853000	0,65	30106,3	8,59
		2021	121675	1914000	0,65	289066,1	8,73
		2022	122200	1935913	0,65	116714,9	6,71
		2023	122400	2066007	0,65	237691,6	5,25
		2024	122674	2281230	0,65	368079,5	4,4
31	3372 Kota Surakarta	2013	507825	915900	3,52	46500	7,22
		2014	510077	1145000	3,49	2535,3	6,16
		2015	514170	1222400	3,48	0	4,53
		2016	516102	1418000	3,48	11657,5	6,29
		2017	517887	1534985	3,5	29262,3	4,47
		2018	519587	1668700	3,51	383298,8	4,35
		2019	522364	1802700	3,53	212674,8	4,16
		2020	522728	1956200	3,54	391912,5	7,92
		2021	523008	2013810	3,54	153236,4	7,85
		2022	526900	2035720	3,58	450421,7	5,83
		2023	528000	2174169	3,57	747795,9	4,58
		2024	529079	2416560	3,56	1029372,1	4,61
32	3373 Kota Salatiga	2013	178594	974000	0,97	0	6,21
		2014	181193	1170000	0,97	258000	4,46
		2015	186420	1287000	0,97	0	6,43
		2016	188928	1450953	0,97	4149,8	6,84
		2017	191571	1596844,87	0,97	98595,9	3,96
		2018	194084	1735930,06	0,97	121931,2	4,23
		2019	192322	1875325,24	0,98	22520,3	4,33
		2020	193525	2034915,42	0,99	91667,3	7,44
		2021	195065	2101457	0,99	92592,4	7,26
		2022	198900	2128523	0,99	101195,1	5,58
		2023	201300	2284180	0,99	178729,9	4,57
		2024	203554	2533583	1	291967	3,86
33	3374 Kota Semarang	2013	1644800	1209100	13,15	977498	6,02
		2014	1672999	1435000	13,3	422954,6	7,76
		2015	1729080	1685000	13,34	211129,4	5,77
		2016	1757686	1909000	13,53	501740,8	6,01
		2017	1786114	2125000	13,68	1129039,2	6,61
		2018	1814110	2310087,5	13,82	8534747,9	5,21
		2019	1653524	2498587,53	14,06	4048092,1	4,5
		2020	1656564	2715000	14,02	6633894,6	9,57
		2021	1659975	2810025	14,42	8483055,5	9,54
		2022	1694700	2835021	14,57	5096829,9	7,6
		2023	1708800	3060349	14,67	6984722,1	5,99

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	X1	X2	X3	X4	Y
		2024	1722421	3454827	14,73	6984840,4	5,82
34	3375 Kota Pekalongan	2013	290870	980000	0,77	53000	5,28
		2014	293704	1165000	0,77	96383,7	5,42
		2015	299220	1291000	0,77	1769,3	4,1
		2016	301870	1500000	0,78	15620,5	7,67
		2017	304477	1623750	0,79	51256,5	5,05
		2018	307097	1765178,63	0,8	96123	6,08
		2019	307150	1906922,47	0,8	24335,2	5,8
		2020	308310	2072000	0,81	26998,6	7,02
		2021	309742	2139754	0,81	410594,8	6,89
		2022	317500	2156213	0,81	69178,4	4,98
		2023	321100	2305823	0,81	502453	5,02
		2024	324564	2545138	0,81	136641,4	4,91
35	3376 Kota Tegal	2013	243860	860000	1,1	5980	9,32
		2014	244998	1044000	1,1	0	9,2
		2015	247210	1206000	1,09	0	8,06
		2016	248094	1385000	1,1	10237,7	8,75
		2017	249003	1499500	1,11	34326,6	8,19
		2018	249905	1630500	1,11	13494,7	7,81
		2019	273825	1762000	1,12	34483,8	8,08
		2020	275781	1925000	1,13	47697,1	8,4
		2021	278299	1982750	1,13	199990,3	8,25
		2022	282800	2005930	1,13	101932,3	6,68
		2023	285800	2145012	1,13	194399,2	6,05
		2024	288817	2376683,82	1,14	514216,6	5,88

Lampiran 2. Output Eviews

OUTPUT EVIEWS

1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	X4	Y
Mean	1019599.	1699708.	2.857333	716772.0	5.228690
Median	975541.5	1743500.	2.150000	191385.1	5.010000
Maximum	2087331.	3454827.	14.73000	16418900	11.98000
Minimum	119935.0	830000.0	0.640000	0.000000	1.500000
Std. Dev.	440709.0	487281.0	2.521294	1598329.	1.821247
Skewness	0.049442	0.122954	2.985528	5.018188	0.600693
Kurtosis	2.875581	2.563088	12.40212	36.11831	3.125665
Jarque-Bera	0.442018	4.398856	2170.934	20957.15	25.53456
Probability	0.801710	0.110867	0.611280	0.241701	0.512673
Sum	4.28E+08	7.14E+08	1200.080	3.01E+08	2196.050
Sum Sq. Dev.	8.14E+13	9.95E+13	2663.551	1.07E+15	1389.799
Observations	420	420	420	420	420

2. Pemilihan Model Data Panel

a. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	17.574470	(34,381)	0.0000
Cross-section Chi-square	396.166717	34	0.0000

b. Uji Haussman

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.434322	1.652177	0.262879	0.7928
X1	6.20E-06	1.43E-06	4.344026	0.0000
X2	-1.04E-06	1.94E-07	-5.341992	0.0000
X3	0.069051	0.282435	0.244483	0.8070
X4	5.55E-08	4.20E-08	1.322615	0.1868

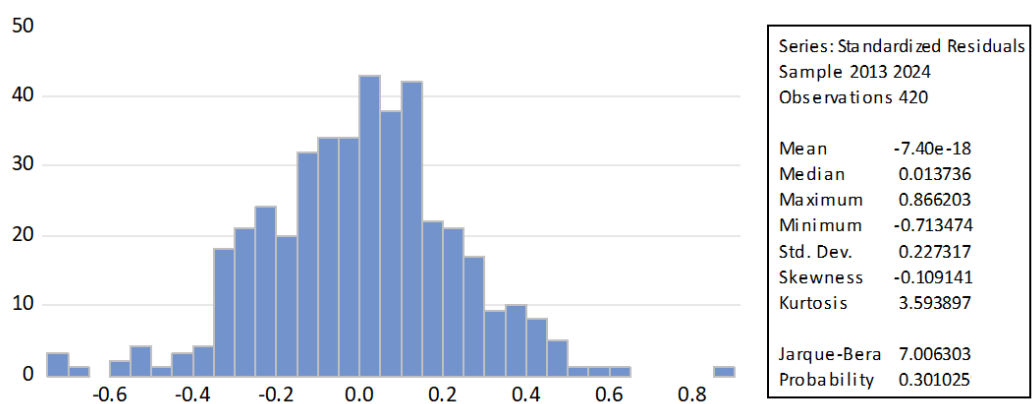
c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	708.9463 (0.0000)	82.36920 (0.0000)	791.3155 (0.0000)
Honda	26.62605 (0.0000)	9.075748 (0.0000)	25.24498 (0.0000)
King-Wu	26.62605	9.075748	21.05315

	(0.0000)	(0.0000)	(0.0000)
Standardized Honda	27.99147 (0.0000)	10.24172 (0.0000)	22.64614 (0.0000)
Standardized King-Wu	27.99147 (0.0000)	10.24172 (0.0000)	18.82139 (0.0000)
Gourieroux, dkk.	--	--	791.3155 (0.0000)

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



b. Uji Multikolenieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.128682	17.13957	NA
X1	5.22E-14	8.577467	1.347545
X2	3.45E-14	14.34891	1.087351
X3	0.001861	3.595108	1.571707
X4	3.64E-15	1.485831	1.236556

c. Uji Heterokedastisitas

F-statistic	0.161128	Prob. F(4,415)	0.9579
Obs*R-squared	0.651267	Prob. Chi-Square(4)	0.9572
Scaled explained SS	0.641091	Prob. Chi-Square(4)	0.9584

d. Uji Autokorelasi

F-statistic	158.8242	Prob. F(2,413)	0.2586
Obs*R-squared	182.5944	Prob. Chi-Square(2)	0.1581

4. Analisis Regresi

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

5. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-14.98088	5.748024	-2.606267	0.0095
X1	1.235230	0.422335	2.924762	0.0037
X	-2.06E-07	4.90E-08	-4.198148	0.0000
X3	-0.002000	0.415941	-0.004809	0.0096
X4	8.85E-09	8.72E-09	1.015441	0.3105

b. Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.600729	Mean dependent var	1.592085
Adjusted R-squared	0.560906	S.D. dependent var	0.359748
S.E. of regression	0.238384	Akaike info criterion	0.058392
Sum squared resid	21.65109	Schwarz criterion	0.433559
Log likelihood	26.73764	Hannan-Quinn criter.	0.206675
F-statistic	15.08522	Durbin-Watson stat	1.616869
Prob(F-statistic)	0.000000		

Adjusted R-squared : 0.560906

c. Uji F

R-squared	0.600729	Mean dependent var	1.592085
Adjusted R-squared	0.560906	S.D. dependent var	0.359748
S.E. of regression	0.238384	Akaike info criterion	0.058392
Sum squared resid	21.65109	Schwarz criterion	0.433559
Log likelihood	26.73764	Hannan-Quinn criter.	0.206675
F-statistic	15.08522	Durbin-Watson stat	1.616869
Prob(F-statistic)	0.000000		

F-statistic : 15.08522

Prob(F-statistic) : 0.000000

FEB UNDIP